



Katalog/Catalogue: 1105014.15



STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI JAMBI

VILLAGE POTENTIAL STATISTICS
OF JAMBI PROVINCE

VOLUME 5, 2025



2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**

BPS-STATISTICS JAMBI PROVINCE

STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI JAMBI

*VILLAGE POTENTIAL STATISTICS
OF JAMBI PROVINCE*

VOLUME 5, 2025

2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**

BPS-STATISTICS JAMBI PROVINCE

Statistik Potensi Desa Provinsi Jambi 2025
Village Potential Statistics of Jambi Province 2025
Volume 5, 2025

Katalog/Catalogue: 1105014.15

Nomor Publikasi/Publication Number: 15000.25054

Ukuran Buku/Book Size: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xxiv+153 Halaman/Pages

Penyusun Naskah/Manuscript Drafter

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

BPS-Statistics Jambi Province

Penyunting/Editor:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

BPS-Statistics Jambi Province

Pembuat Kover/Cover Designer:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

BPS-Statistics Jambi Province

Diterbitkan oleh/Published by:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

BPS-Statistics Jambi Province

Sumber Ilustrasi/Illustration Source:

www.canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

It is prohibited reproduce and/or duplicate part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Jambi Province.



Tim Penyusun *Compilers*

Statistik Potensi Desa Provinsi Jambi 2025
Village Potential Statistics of Jambi Province 2025
Volume 5, 2025

Pengarah/Director
Agus Sudibyo

Penanggung Jawab/Person in Charge
Sisila Nurteta

Penyunting/Editors
Ani Dwi Nugraeni • Nopriansyah

Pengolah Data, Penulis Naskah, dan Penerjemah/Data Processors, Writers, and Translators
Ani Dwi Nugraeni • Sinta Bela

Penata Letak/Layouters
Sinta Bela • Ririh Jatismara



Kata Pengantar

Statistik Potensi Desa Provinsi Jambi 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh Provinsi Jambi menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Data dan informasi yang disajikan pada tingkat nasional merupakan agregasi data tingkat provinsi. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat provinsi yang merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) hingga tersusunnya publikasi ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi di masa mendatang.

Jambi, Desember 2025
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jambi

Agus Sudibyo



Preface

Village Potential Statistics of Jambi Province 2025 belongs to a series of publications by BPS which presents the results of the Village Development Data Update (Village Potential 2025). This publication contains an overview of village-level government administration areas throughout Jambi Province according to the potential of the village, the availability of infrastructure in the village, and also the challenges faced in the village.

Data and information presented at the national level are provincial level data aggregation. Meanwhile, a similar publication at provincial level is also made which presents the aggregation of data at regency/municipality level.

This publication is expected to be a reference for data and information on infrastructure and regional potential for policymakers at the national and regional levels, as well as for researchers, academics, and data users in general. Early detection and phenomenon of infrastructure availability as well as potential among regions are captured in the various tables presented in this publication.

We would like to thank all parties who have participated in making the Village Development Data Update (Village Potential 2025) activity a success until this publication was compiled. We welcome constructive criticism and suggestions from users of this publication to improve future editions of this publication.

*Jambi, December 2025
Head of BPS-Statistics
Jambi Province*

Agus Sudibyo





Ringkasan Eksekutif

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi telah melaksanakan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) pada bulan Juni 2025 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintah terendah setingkat desa. Adapun wilayah administrasi setingkat desa yang dicakup di Potensi Desa (Podes) 2025 meliputi desa dan kelurahan. Hasil Podes 2025 mencatat bahwa 1.586 wilayah administrasi pemerintah setingkat desa yang ada di Provinsi Jambi terdiri dari 1.415 desa dan 171 kelurahan yang tersebar di 144 kecamatan dan 11 kabupaten/kota.

Podes 2025 mengumpulkan beragam informasi, baik yang bersifat potensi yang dimiliki desa/kelurahan maupun informasi terkait kerawanan atau tantangan yang dihadapi desa/kelurahan serta infrastruktur dasar di desa/kelurahan. Informasi terkait potensi desa/kelurahan, meliputi kependudukan, perumahan dan lingkungan hidup, bencana alam dan mitigasi bencana alam, pendidikan dan kesehatan, angkutan, komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan, keuangan dan aset desa, dan keterangan pemerintahan desa/kelurahan.

Hasil Podes 2025 menunjukkan sebagian besar desa/kelurahan di Provinsi Jambi masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, yaitu 1.401 desa/kelurahan. Selain itu, ada 42 desa/kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang industri, dan ada 143 desa/kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang jasa.

Podes 2025 menunjukkan potensi ekonomi yang dimiliki desa/kelurahan, terdapat 369 desa/kelurahan yang memiliki produk barang unggulan. Dalam mendukung bergeraknya perekonomian tidak hanya ditunjang oleh sarana fisik, namun dukungan fasilitas perkreditan dan fasilitas jaringan telekomunikasi menjadi penting di masa kini agar geliat pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Hasil Podes 2025 menunjukkan terdapat 1.405 desa/kelurahan yang warganya menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), ada 203 desa/kelurahan yang warganya menerima Kredit Usaha Kecil (KUK), dan ada 122 desa/kelurahan yang warganya menerima Kredit Usaha Bersama (KUBE). Fasilitas jaringan telekomunikasi yang dicakup di Podes yaitu keberadaan *Base Transceiver Station* (BTS), sinyal telepon seluler, dan sinyal internet telepon seluler/handphone. Terdapat 1.571 desa/kelurahan yang ada sinyal telepon selular, tetapi 194 desa/kelurahan kekuatan sinyalnya lemah, dan masih ada 15 desa/kelurahan yang tidak ada sinyal telepon selular di wilayahnya.

Podes 2025 mencatat terdapat 407 desa/kelurahan terjadi pencemaran air di wilayahnya, terdapat 43 desa/kelurahan terjadi pencemaran tanah di wilayahnya, dan terdapat 40 desa/kelurahan terjadi pencemaran udara di wilayahnya. Selain kejadian pencemaran, Podes 2025



menunjukkan kejadian bencana alam di wilayah desa/kelurahan pada periode Januari 2024 sampai dengan Mei 2025, ada 631 desa/kelurahan terjadi bencana banjir di wilayahnya, ada 88 desa/kelurahan terjadi bencana tanah longsor di wilayahnya, dan ada 20 desa/kelurahan terjadi bencana angin puyuh/puting beliung/topan di wilayahnya.

Podes 2025 juga menyajikan berbagai informasi terkait ketersediaan infrastruktur berbagai bidang di Provinsi Jambi. Pada bidang pendidikan, di jenjang sekolah dasar diketahui bahwa ada 2.487 SD Negeri dan Swasta dan ada 379 MI Negeri dan Swasta yang tersebar di desa/kelurahan di Provinsi Jambi. Pada jenjang sekolah menengah pertama, ada 719 SMP Negeri dan Swasta dan 442 MTs Negeri dan Swasta yang tersebar di desa/kelurahan di Provinsi Jambi. Pada jenjang sekolah menengah atas ada 254 SMA Negeri dan Swasta, ada 267 MA Negeri dan Swasta, dan ada 187 SMK Negeri dan Swasta yang tersebar di desa/kelurahan di Provinsi Jambi. Pada jenjang akademi/ perguruan tinggi ada 5 akademi/ perguruan tinggi negeri dan ada 48 akademi/ perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi. Pada bidang kesehatan, Podes 2025 menunjukkan terdapat 44 rumah sakit, dimana Kota Jambi adalah wilayah kabupaten/ kota dengan keberadaan rumah sakit terbanyak di Provinsi Jambi yaitu 17 rumah sakit. Selain rumah sakit, jumlah fasilitas puskesmas di Provinsi Jambi berdasarkan Podes 2025 sebanyak 101 puskesmas rawat inap dan 110 puskesmas tanpa rawat inap.

Pemerintah memprioritaskan pembangunan yang dimulai dari desa dengan tujuan pemerataan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan. Hasil Pendataan Podes dapat digunakan sebagai bahan analisis kewilayahan terkait potensi ekonomi, sosial dan sarana/prasarana wilayah. Selain itu juga dapat digunakan dalam evaluasi program dan digunakan dalam penyusunan kebijakan/strategi berbasis kewilayahan.



Executive Summary

BPS-Statistics Jambi Province has carried out data collection on Village Development Data Update 2025 (Village Potential 2025) in June 2025 in a census of all lowest government administrative areas at the village level. The village-level administrative areas covered by Podes include villages and subdistricts. The results of the Podes 2025 data collection noted that 1,586 government administrative areas at the village level in Jambi Province consisted of 1,415 villages and 171 subdistrict spread across 144 subdistricts and 11 regencies/municipalities.

Podes 2025 collects a variety of information, both those are potential for villages/subdistricts, information related to vulnerabilities or challenges faced by villages/subdistricts, and basic infrastructure in village/subdistrict. Information related to the potential of the village/subdistrict, includes demography, settlement and environment, natural disasters and disaster mitigation, education and health, transportation, communication and information, economy, security, village finance and assets, and information on village/subdistrict government.

The results of Podes 2025 shows that most of the villages/subdistricts in Jambi Province have people working in agriculture, namely 1,401 villages/subdistricts. In addition, there are 42 villages/subdistricts where most of the people work in industry, and there are 143 villages/subdistricts where most of the people work in the service sector.

Podes 2025 shows the economic potential of villages/subdistricts, there are 25,679 villages/subdistricts that have superior goods products. Economic growth is supported not only by physical facilities, but also by credit facilities and telecommunication networks, which together help boost economic growth. The results of Podes 2025 show that there are 1,405 villages/subdistricts whose residents receive People's Business Credit (KUR), 203 villages/subdistricts whose residents receive Small Business Credit (KUK), and 122 villages/subdistricts whose residents receive Joint Business Credit (KUBE). The telecommunication network facilities covered by the Podes include the presence of a Base Transceiver Station (BTS), cellular phone signals, and cellular/mobile phone internet signals. There are 1,571 villages/subdistricts that have a cellular phone signal, but 194 villages/subdistricts have weak signal strength, and there are still 15 villages/subdistricts that do not have a cellular phone signal in their area.

Podes 2025 noted that there were 407 villages/subdistricts where water pollution occurred in their territory, there were 43 villages/subdistricts where soil pollution occurred in their territory, and there were 40 villages/subdistricts where air pollution occurred in their territory. Apart



from reporting pollution incidents, Podes 2025 also records natural disasters occurring in villages/subdistricts during the period from January 2024 to May 2025. During this period, 631 villages/subdistricts experienced floods, 88 villages/subdistricts experienced landslides and 20 villages/subdistricts experienced thypoon/cyclone.

Podes 2025 also provides various information related to the availability of infrastructure in various fields in Jambi Province. In the field of education, at the elementary school level, it is known that there are 2,487 public and private elementary schools, and 379 public and private MI spread across villages/subdistricts in Jambi Province. At the junior high school level, thereare 719 public and private junior high schools and 442 public and private MTs spread across villages/subdistricts in Jambi Province. At the high school level, there are 254 public and private SMAs, 267 public and private MAs, and 187 public and private SMKs spread across villages/subdistricts in Jambi Province. At the academy/college level, there are 5 public academies/universities and there are 48 private academies/universities in Jambi Province. In the health sector, Podes 2025 shows 44 hospitals across Jambi Province, with Jambi City having the highest number at 17 hospitals. In addition to hospitals, the number of Public Health Center (Puskesmas) facilities based on the Podes 2025 is 101 inpatient health centers and 110 health centers without inpatient services.

The government prioritises development starting from villages with the aim of economic equality and accelerating poverty alleviation. The results of Podes 2025 can be used as material for regional analysis related to the economic, social and regional facilities/infrastructure potential. In addition, it can also be used in program evaluation and used in the formulation of regional-based policies/strategies.



Daftar Isi

Contents

Statistik Potensi Desa Provinsi Jambi 2025
Village Potential Statistics of Jambi Province 2025
Volume 5, 2025

	Halaman Pages
Kata Pengantar/ <i>Preface</i>	v
Ringkasan Eksekutif/ <i>Executive Summary</i>	vii
Daftar Isi/ <i>Contents</i>	xi
Daftar Tabel/ <i>List of Tables</i>	xiii
Daftar Lampiran/ <i>List of Appendices</i>	xix
Penjelasan Teknis Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025)/ <i>Technical Notes of Village Development Data Update 2025 (Potential Village 2025)</i>	xxi
1 Keterangan Umum Desa/ <i>General Information of the Village</i>	1
2 Perumahan dan Lingkungan/ <i>Settlement and Environment</i>	15
3 Pendidikan dan Kesehatan/ <i>Education and Health</i>	33
4 Angkutan, Komunikasi, dan Informasi/ <i>Transportation, Communication, and Information</i>	45
5 Sarana Ekonomi dan Industri/ <i>Economic and Industry Facilities</i>	59
6 Keuangan dan Aset Desa/ <i>Village Financial and Assets</i>	71
7 Keterangan Pemerintah Desa/Kelurahan/ <i>Village/ Subdistrict Government Information</i> ...	79
8 Bencana Alam dan Gangguan Keamanan/ <i>Natural Disaster and Security Disturbance</i>	91
9 Infrastruktur Pendidikan/ <i>Education Infrastructure</i>	111
10 Infrastruktur Kesehatan/ <i>Health Infrastructure</i>	121
11 Infrastruktur Ekonomi/ <i>Economic Infrastructure</i>	131
Daftar Pustaka/ <i>Bibliography</i>	141
Lampiran/ <i>Appendix</i>	143



Daftar Tabel

List of Tables

Tabel
Tables

Halaman
Pages

1	KETERANGAN UMUM DESA GENERAL INFORMATION OF THE VILLAGE.....	1
1.1	Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Governmental Administrative Regions by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025.....</i>	8
1.2	Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi Pemerintahan di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of the Lowest Governmental Administrative Regions by Regency/Municipality and Governmental Classification in Jambi Province, 2025.....</i>	9
1.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Village Location to Forest Area in Jambi Province, 2025</i>	10
1.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Lokasi Desa Terhadap Laut di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Location of Village Toward the Sea in Jambi Province, 2025.....</i>	11
1.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Main Income Source of the Majority of Population in Jambi Province, 2025.....</i>	12
1.6	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Sebagian Besar Penduduknya Bekerja pada Sektor Pertanian Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sub Sektor Utama di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts that the Majority of Population Work in Agricultural Sector By Regency/Municipality and Main Type of Sub-Sector in Jambi Province, 2025.....</i>	13
2	PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN SETTLEMENT AND ENVIRONMENT.....	15
2.1	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Bukan Pengguna Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with Presence of Family of Electric Consumer and Non Electric Consumer by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025.....</i>	22
2.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Jalan Utama Desa di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Source of Lighting for the Main Village Road in Jambi Province, 2025.....</i>	23
2.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan Sebagian Besar Keluarga di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Cooking Fuel Used by Majority of Families in Jambi Province, 2025</i>	24

**Tabel
Tables****Halaman
Pages**

2.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Agen/Penjual Bahan Bakar di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Availability of Agent/Seller of Fuel in Jambi Province, 2025</i>	26
2.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Environmental Pollution in Jambi Province, 2025</i>	27
2.6	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Utama Pencemaran di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with Environmental Pollution by Regency/Municipality and Main Source of Pollution in Jambi Province, 2025</i>	28
2.7	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and the Existence of Environmental Management and Conservation Activities in Jambi Province, 2025</i>	29
2.8	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and the Existence of Climate Change Adaptation and Mitigation Activities in Jambi Province, 2025</i>	30
3	PENDIDIKAN DAN KESEHATAN EDUCATION AND HEALTH	33
3.1	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sarana Pendidikan di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with Availability Educational Facilities by Regency/Municipality and Type of Educational Facilities in Jambi Province, 2025</i>	41
3.2	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sarana Kesehatan di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with by Availability of Health Facilities by Regency/Municipality and Type of Health Facilities in Jambi Province, 2025</i>	42
3.3	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kegiatan Posyandu dan Posbindu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with Integrated Health Post and Integrated Development Post Activities by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025</i>	44
4	ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI TRANSPORTATION, COMMUNICATION, AND INFORMATION	45
4.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Prasarana Transportasi di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Transportation Infrastructure in Jambi Province, 2025</i>	50
4.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Ketersediaan Angkutan Umum di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Availability of Public Transportation in Jambi Province, 2025</i>	51
4.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Ketersediaan Angkutan Online di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Availability of Online Transportation in Jambi Province, 2025</i>	52



Tabel Tables	Halaman Pages
4.4 Banyaknya Desa/Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat atau Darat dan Air Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan Darat Terluas di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts Used Land or Land and Water Transportation Infrastructure by Regency/Municipality and Type of the Widest Road Surface in Jambi Province, 2025.....</i>	53
4.5 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Base Transceiver Station (BTS) di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Existence of Base Transceiver Station (BTS) in Jambi Province, 2025.....</i>	54
4.6 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Kekuatan Sinyal Telepon Seluler di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and the Strength of Cellular Phone Signal in Jambi Province, 2025.....</i>	55
4.7 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Kekuatan Sinyal Internet di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and the Strength of Internet Signal in Jambi Province, 2025.....</i>	56
4.8 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Layanan Pos dan Ekspedisi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Existence of Postal and Expedition Services by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025.....</i>	57
5 SARANA EKONOMI DAN INDUSTRI ECONOMIC AND INDUSTRY FACILITIES.....	59
5.1 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Perdagangan dan Akomodasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Availability of Trade and Accommodation Facilities by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025.....</i>	64
5.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Kelompok Pertokoan dan Pasar di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and the Availability of Shopping Complexes and Markets in Jambi Province, 2025.....</i>	65
5.3 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Bank di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and the Availability of Bank in Jambi Province, 2025.....</i>	66
5.4 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Availability of Cooperatives by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025.....</i>	67
5.5 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Fasilitas Perkreditan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Availability of Credit Facilities by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025.....</i>	68
5.6 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Industri Mikro dan Kecil dan Sentra Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Availability of Micro and Small Industries and Industrial Centers by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025.....</i>	69



**Tabel
Tables**

**Halaman
Pages**

5.7	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Produk Barang Unggulan di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and the Availability of Leading Products in Jambi Province, 2025</i>	70
6	KEUANGAN DAN ASET DESA VILLAGE FINANCIAL AND ASSETS	71
6.1	Banyaknya Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages by Regency/Municipality and Availability of Village Information System in Jambi Province, 2025</i>	74
6.2	Banyaknya Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sistem Keuangan Desa di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages by Regency/Municipality and Village Financial System in Jambi Province, 2025</i>	75
6.3	Banyaknya Desa dengan Kepemilikan Badan Usaha dan Aset Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages with the Ownership of Enterprise and Village Assets by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025</i>	76
6.4	Banyaknya Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Peraturan Desa Tahun 2024 di Provinsi Jambi <i>Number of Villages by Regency/Municipality and Availability of Village Regulation for 2024 in Jambi Province</i>	78
7	KETERANGAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN VILLAGE/SUBDISTRICT GOVERNMENT INFORMATION.....	79
7.1	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Existence of the Village/Subdistrict Government by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025</i>	83
7.2	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah dan/atau Sekretaris Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Head and Village/Subdistrict Secretary by Regency/Municipality and Sex in Jambi Province, 2025</i>	84
7.3	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Head by Regency/Municipality and Age Group in Jambi Province, 2025</i>	85
7.4	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Sekretaris Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Secretary by Regency/Municipality and Age Group in Jambi Province, 2025</i>	86
7.5	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Head by Regency/Municipality and Education Attainment in Jambi Province, 2025</i>	87
7.6	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Sekretaris Desa/Lurah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Secretary by Regency/Municipality and Education Attainment in Jambi Province, 2025</i>	89

8	BENCANA ALAM DAN GANGGUAN KEAMANAN NATURAL DISASTER AND SECURITY DISTURBANCE.....	91
8.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and the Type of Effort in Anticipation/Mitigation of Natural Disaster in Jambi Province, 2025</i>	99
8.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bencana Alam di Provinsi Jambi, 2025 ¹ <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Natural Disaster in Jambi Province, 2025¹</i>	100
8.3	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Aktivitas yang Berpotensi Meningkatkan Emisi Gas Rumah Kaca Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 ¹ <i>Number of Villages/Subdistricts with Activities that Have the Potential to Increase Greenhouse Gas Emissions by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025¹</i>	102
8.4	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Kejadian yang Dirasakan Penduduk Akibat Perubahan Iklim Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 ¹ <i>Number of Villages/Subdistricts with Events Perceived by Residents as Resulting from Climate Change by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025¹</i>	104
8.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Kejadian Perkelahian Massal di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and the Occurrence of Mass Fight in Jambi Province, 2025</i>	106
8.6	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Korban Meninggal dan Luka-Luka di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with Incidents of Mass Fight by Regency/Municipality and the Presence of Fatalities and Injuries in Jambi Province, 2025</i>	107
8.7	Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota dan Inisiator Penyelesaiannya di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts with Incidents of Mass Fight by Regency/Municipality and Initiator of the Resolution in Jambi Province, 2025</i>	108
8.8	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Citizen's Effort to Secure Community in Jambi Province, 2025</i>	109
9	INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN EDUCATION INFRASTRUCTURE	111
9.1	Banyaknya SD/MI Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Public and Private Elementary Schools by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025</i>	115
9.2	Banyaknya SMP/MTs Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Public and Private Junior High Schools by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025</i>	116
9.3	Banyaknya SMA/MA Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Public and Private Senior High Schools by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025</i>	117



**Tabel
Tables**

**Halaman
Pages**

9.4	Banyaknya SMK Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Public and Private Vocational Schools by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025.....</i>	118
9.5	Banyaknya Akademi/Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Public and Private Academy/University by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025.....</i>	119
10	INFRASTRUKTUR KESEHATAN HEALTH INFRASTRUCTURE.....	121
10.1	Banyaknya Rumah Sakit, Klinik Utama, dan Balai Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Hospitals, Principal Clinics, and Health Centers by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025</i>	127
10.2	Banyaknya Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Public Health Center by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025.....</i>	128
10.3	Banyaknya Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter, Tempat Praktik Bidan, dan Apotek Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Primary Clinics, Independent Physician Practices, Independent Midwife Practices, and Pharmacies by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025.....</i>	129
11	INFRASTRUKTUR EKONOMI ECONOMIC INFRASTRUCTURE	131
11.1	Banyaknya Kelompok Pertokoan dan Pasar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Shopping Complexs And Markets by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025</i>	136
11.2	Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Trading Facilities by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025</i>	137
11.3	Banyaknya Sarana Akomodasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Acomodation Facilities by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025.....</i>	138
11.4	Banyaknya Lembaga Keuangan Bank Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Bank Facilities by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025.....</i>	139
11.5	Banyaknya Lembaga Keuangan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025 <i>Number of Cooperative by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025.....</i>	140



Daftar Lampiran

List of Appendices

Lampiran Appendices	Halaman Pages
1 Realisasi Cakupan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) Menurut Kabupaten/Kota ¹ di Provinsi Jambi <i>Realisation of the Coverage of Village Development Data Update 2025 (Village Potential 2025) by Regency/Municipality¹ in Jambi Province</i>	145
2 Kuesioner Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) <i>Questionnaire of Village Development Data Update 2025 (Village Potential 2025)</i>	146

<https://jambi.bps.go.id>



Penjelasan Teknis Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025)

1. Pendataan Podes telah dilaksanakan sekitar 19 kali sejak 1976. Dalam 16 tahun terakhir (2008–2024) dilaksanakan dua tahun menjelang sensus. Mulai tahun 2019, pada tahun-tahun yang tidak ada Pendataan Podes, dilakukan Updating Podes (Pemutakhiran Data Perkembangan Desa).
2. Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) sebagai sarana untuk *Updating Master File Desa* (MFD); (2) menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi, sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah; (3) menyediakan data bagi keperluan klasifikasi tipologi desa; (4) menyediakan data bagi keperluan penyusunan Indeks Kesulitan Geografis sebagai salah satu alokasi dana desa, (5) sebagai sumber data pemutakhiran peta wilayah kerja statistik; (6) menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil (*small area statistics*); (7) menyediakan data bagi penyusunan berbagai analisis seperti identifikasi dan penentuan desa tertinggal, variabel konteks dalam PMT, identifikasi desa rawan bencana,

Technical Notes on Village Development Data Update 2025 (Village Potential 2025)

1. *Village Potential Census (Podes) has been carried out approximately 19 times since 1976. In the last 16 years, (2008–2024), Village Potential Census has been carried out every two years prior to census. Starting in 2019, in years when there is no Village Potential Census, Podes updating (Village Development Data Update) is carried out.*
2. *The Village Development Data Update 2025 (Village Potential 2025) is carried out to achieve the following objectives: (1) to serve as data source to update the BPS "Master File Desa" (Village Master File); (2) to provide the data on the existence and development of the potential of villages/subdistricts include social, economy, and facilities and infrastructures aspect; (3) to provide the data for village classification typology; (4) to provide data for the preparation of the Geographical Difficulty Index, which is used as one of the bases for village fund allocation; (5) to serve as a data source for updating statistical area map; (6) to provide main data for compilation of small area statistics; (7) to provide data for compilation of various analyses such as identification and determining disadvantaged village, context variables in the PMT, identification of disaster prone village, and identification of the*



dan identifikasi desa yang mempunyai kesulitan geografis; (8) menyediakan data bagi penghitungan indikator-indikator pembangunan/kemajuan desa.

3. Podes 2025 dilaksanakan di seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa meliputi desa, kelurahan, nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait di seluruh Indonesia.
4. Suatu wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai target lokasi pendataan jika wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang definitif dan operasional dengan kriteria sebagai berikut: (1) memiliki batas wilayah yang jelas, (2) memiliki penduduk yang menetap di wilayahnya, dan (3) memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.
5. Instrumen Podes 2025 yang digunakan sebanyak dua jenis kuesioner, yaitu: PODES2025-DESA dan PODES2025-2T. Sementara itu, referensi waktu bagi setiap data merujuk pada periode pencacahan yaitu Juni 2025, kecuali bagi beberapa data tertentu yang dinyatakan memiliki referensi waktu yang berbeda misalnya satu atau tiga tahun sebelum periode pencacahan.
6. Pengumpulan data Podes 2025 dilakukan melalui wawancara

village with geographical difficulties; (8) to provide the data used for calculating the village development/progress index.

3. *Podes 2025 is implemented in all administrative region equivalent to village, including villages, sub-districts, nagari, Transmigration Settlement Units (UPT), and Entity of Transmigration Settlement (SPT) that are still under the guidance of the relevant ministries throughout Indonesia.*
4. *An administrative area is designated as a target location for data collection if it has been declared as a definitive and operational area, based on the following criteria: (1) having jurisdiction with clear boundaries, (2) has a population residing permanently in its territory, and (3) has a legitimate and sovereign government.*
5. *The instruments of Podes 2025 consist of two types of questionnaires, namely: PODES2025-DESA and PODES2025-2T. Meanwhile, the time reference for each data refers to the enumeration period, which is June 2025, except for certain data that are specified to have different reference periods, such as one or three years prior to the enumeration period.*
6. *Data collection of Podes 2025 carried out through direct interviews by trained*



langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan di wilayah pencacahan serta penelusuran dokumen terkait. Petugas wawancara adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS kabupaten/kota yang telah dinyatakan lulus pelatihan pendataan Podes 2025. Sementara itu, narasumber yang dipilih adalah beberapa orang yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap wilayah target pencacahan. Kemajuan pendataan dilaporkan dan dipantau secara langsung melalui *web dashboard*.

7. Pengolahan data Podes 2025 secara umum sudah dilakukan secara otomatis melalui penggunaan CAPI dalam pencacahan, sehingga input data dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses wawancara. Selain berfungsi sebagai media input data, CAPI juga merupakan media pertama yang digunakan untuk melakukan evaluasi data dengan rule validasi yang telah terpasang dalam aplikasi. Dalam rangka menjamin kualitas data, pelaksanaan Podes 2025 menggunakan dashboard Podes yang dilengkapi dengan menu *query tools* dan tabulasi untuk mengevaluasi data hasil Podes 2025. Selain itu, penjaminan kualitas data juga dilakukan melalui pemeriksaan data secara bertingkat di tingkat kabupaten, provinsi, sampai dengan tingkat BPS Pusat.

enumerators with relevant respondents in the enumeration area and review of relevant documents. The enumerators are BPS regency/city employees or partners that have passed Podes enumeration training. Meanwhile, the selected respondents are several people who have the knowledge, authority, and responsibility towards the target area of enumeration. The progress of data collection is reported and monitored directly through and are presented in real time on the dashboard web.

7. *The processing of Podes 2025 data has generally been carried out automatically through the use of CAPI in the enumeration so that data input can be carried out simultaneously with the interview process. In addition to functioning as a data input media, CAPI is also the first media used for evaluating data through validation rules installed in the application. To ensure data quality, the implementation of Podes 2025 utilizes the Podes Dashboard, which is equipped with query tools and tabulation features to evaluate the Podes 2025 results. In addition, data quality assurance is also carried out through data checks at various levels at the regency, provincial, up to the BPS RI level.*



8. Diseminasi hasil pendataan Podes 2025 disusun ke dalam beberapa jenis publikasi yang utama yaitu: Statistik Potensi Desa Indonesia 2025, Statistik Potensi Desa Provinsi 2025, dan Statistik Indonesia 2026. Publikasi Statistik Potensi Desa Indonesia 2025 dibuat dalam dua cakupan data yaitu publikasi nasional (dirinci menurut provinsi) dan publikasi provinsi (dirinci menurut kabupaten/kota).

9. Pada pelaksanaan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Podes 2025), tidak ada desa/kelurahan yang tidak berhasil dicacah karena kendala keamanan dan faktor lainnya. Cakupan desa/kelurahan yang berhasil dicacah menurut provinsi disajikan pada Lampiran 1.

8. *The dissemination of Podes 2025 is prepared into some main publications namely: Village Potential Statistics of Indonesia 2025, Village Potential Statistics of Province 2025, and Statistical Yearbook of Indonesia 2026. The book of Village Potential Statistics of Indonesia 2025 is drafted in two data scopes, namely the national publication (disaggregated by province) and the provincial publication (disaggregated by district/municipality).*

9. *During the implementation of the Village Development Data Update 2025 (Podes 2025) all villages/subdistricts were successfully enumerated, with no cases of failure due to security issues or other factors. The coverage of successfully enumerated villages/subdistricts by province is presented in Appendix 1.*

Keterangan Umum Desa

General Information on The Village



98,30%
Bukan Desa Tepi Laut
Non-Coastal Area

1,70%
Desa Tepi Laut
Coastal Area

82,22%

Desa di
luar hutan
Outside
the forest



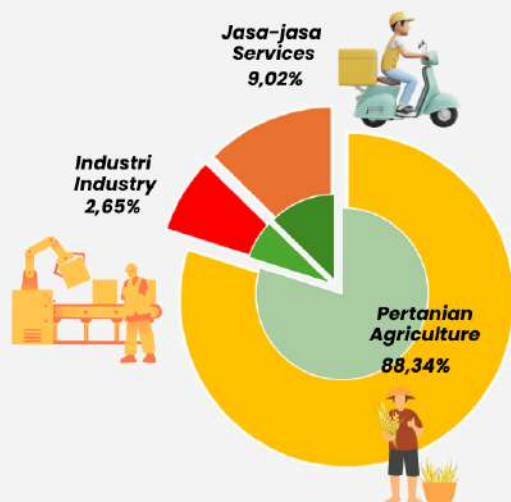
17,34%
Desa di tepi/sekitar hutan
Around the forest

0,44%

Desa di dalam hutan
Inside the forest

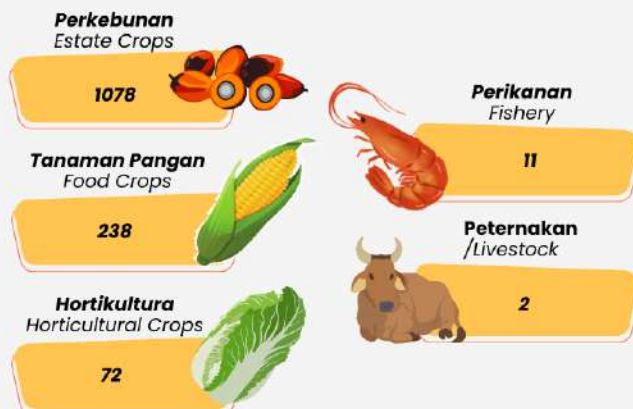
Desa/Kelurahan dengan Sumber Penghasilan Utama sebagian besar Penduduk

Villages by the Main Income Source of
Majority Population



Desa/Kelurahan dengan Penghasilan Utama di Sektor Pertanian Menurut Sub Sektor

Villages with the Agricultural Main
Income by Sub-Sector





Penjelasan Teknis Keterangan Umum Desa

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
2. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)
3. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) adalah satuan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal

Technical Notes General Information of the Village

1. Village is village and custom village or that is called by other terms, hereinafter referred to as the village is the unity of the legal community who have territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, the interest of local communities based on community initiatives, the origin and local customs that are acknowledged and respected within the unitary System of Government Republic of Indonesia (Law No. 6 Year 2014 about Village).
2. Subdistrict is division of administrative areas in Indonesia under the district. Subdistrict is led by a head of subdistrict (Lurah) as an apparatus of district and responsible to the district head. The Lurah inaugurated by regent/mayor head as suggestion by region secretary from civil servants who qualified according regulation (Law No. 23 Year 2014 about Local Governmental).
3. Transmigration Settlement Unit (UPT) is entity of transmigration settlement that serves as a residence and place of business for migrants that is planned to form a village or join the local village. Organizational of transmigration



direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat. Organisasi UPT merupakan kelembagaan yang bersifat sementara dibentuk sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum transmigran ditempatkan dan paling lama 5 tahun (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.22/MEN/IX/2007).

4. Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) adalah satuan permukiman potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2003 tentang Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigasi).
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari). Catatan: nagari dapat dilihat datanya pada publikasi nasional dan publikasi Provinsi Sumatera Barat.

settlement unit is a temporary institution established for at least 2 months before the migrants are placed and maximum of 5 years (Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. PER.22/MEN/IX/2007).

4. *Entity of Transmigration Settlement (SPT) is potential settlement unit that designed as transmigration settlements to support the economic growth centers in the region that already exist or are being developed accordance with the spatial plans (Decision of the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. 246 Year 2003 concerning Procedures and Criteria for Preparation of Settlement Location Transmigasi).*
5. *Nagari is customary law community units that have certain territorial boundaries, and are authorized to regulate and manage the interests of its own local community based on the Minangkabau traditional philosophy (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) or based on local origins and customs in the West Sumatra Province (Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari). Note: the data of nagari is found in the national publications and the publication of Province of Sumatra Barat.*



6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
 7. Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan/ Hutan, dibedakan menjadi:
 - a. Di Dalam Kawasan Hutan adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya terletak di tengah/ dikelilingi hutan.
 - b. Di Tepi/Sekitar Kawasan Hutan adalah desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan, atau sebagian wilayah desa tersebut berada di dalam hutan.
 - c. Di Luar Kawasan Hutan adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan hutan.
 8. Desa Tepi Laut adalah desa yang sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang.
 9. Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk adalah lapangan usaha sebagian besar penduduk desa/ kelurahan memperoleh penghasilan/ pendapatan. Sumber penghasilan penduduk dibedakan kedalam tiga kategori kegiatan ekonomi antara lain:
6. *Forest is the unit of ecosystem in the form of lands comprising biological resources that are dominated by trees in their natural environment that can not be separated (Law No. 41 Year 1999).*
 7. *Village Location of the Forest Area, divided into:*
 - a. *Inside the Forest Area is the village/subdistrict whose all territory is located in the middle or surrounded by forests.*
 - b. *Around the Forest Area is the village/subdistrict whose territory is adjacent to forest areas or parts of villages located in forest.*
 - c. *Outside the Forest Area is the village/subdistrict whose territory is not directly adjacent to the forest.*
 8. *Coastal Village is a village which some areas are intersect/directly adjacent to the sea, either gently sloping/flat beach or cliffs/reef.*
 9. *Main Income Source of the Majority of Population is field of business where most residents earn revenue/income, main income population are divided into three categories of economic activities, including:*



- a. Pertanian, mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
 - b. Industri meliputi pertambangan dan penggalian, manufaktur, konstruksi dan utilitas publik (listrik, gas dan air), sesuai dengan kategori B sampai F ISIC 4, yang meliputi sektor Pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan Konstruksi.
 - c. Jasa meliputi perdagangan grosir dan eceran, restoran dan hotel, transportasi, penyimpanan dan komunikasi, keuangan, asuransi, real estat dan layanan bisnis, dan layanan masyarakat, sosial dan pribadi.
10. Jenis Komoditi/Sub Sektor Pertanian antara lain meliputi:
- a. Tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan.
 - b. Tanaman hortikultura lebih sering mengarah pada produk-produk yang bisa dikonsumsi atau tanaman kebun, seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias.
 - c. Perkebunan dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan.
- a. *Agriculture, includes all economic activities/business fields, which include the agricultural, forestry and fisheries sectors.*
- b. *Industry includes mining and quarrying, manufacturing, construction, and public utilities (electricity, gas, and water), according to categories B to F ISIC 4, which includes the Mining and Quarrying, Manufacturing, Electricity and Gas Supply, Water Supply, Waste Management, Waste and Recycling, and Construction sectors.*
- c. *Services include wholesale and retail trade, restaurants and hotels, transportation, storage and communications, finance, insurance, real estate and business services, and community, social and personal services.*
10. *The Type of Commodity/Agriculture Subsector,*
- a. *Food crops are grouped based on age, namely annual crops and perennial crops.*
 - b. *Horticultural crops more often refer to edible products or garden crops, such as fruits, vegetables, and ornamental plants.*
 - c. *Plantations are grouped based on age, namely annual plants and perennial plants.*



- d. Kehutanan mencakup penebangan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar.
 - e. Perikanan mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting) moluska, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.
 - f. Peternakan mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan.
 - g. Jasa penunjang pertanian dan pasca panen mencakup kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk jasa pemanenan dan pasca panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar.
- d. *Forestry includes the felling of trees for their wood as well as the collection and harvesting of forest products other than wild wood.*
 - e. *Fisheries include the capture and cultivation of fish, crustaceans (such as shrimp and crabs), mollusks, and other aquatic life in marine, brackish, and freshwater environments. Recreational fishing is excluded.*
 - f. *Animal husbandry includes the cultivation and breeding of livestock, poultry, insects, reptiles, worms, pets.*
 - g. *Agricultural and post-harvest support services include supporting activities in producing agricultural products and similar activities for agriculture that are not carried out for production purposes on a fee or contract basis, including harvesting and post-harvest services, and preparing agricultural products for sale to the market.*

**Tabel**
Table

1.1

Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025***Number of Governmental Administrative Regions by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025***

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kecamatan <i>District</i>	Desa/Kelurahan <i>Village/Subdistrict</i>
(1)	(2)	(3)
Kerinci	18	287
Merangin	24	215
Sarolangun	11	159
Batang Hari	8	124
Muaro Jambi	11	155
Tanjung Jabung Timur	11	93
Tanjung Jabung Barat	13	134
Tebo	12	129
Bungo	17	153
Kota Jambi	11	68
Kota Sungai Penuh	8	69
Provinsi Jambi	144	1.586



Tabel 1.2 Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi Pemerintahan di Provinsi Jambi, 2025
Number of the Lowest Governmental Administrative Regions by Regency/Municipality and Governmental Classification in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Desa Village	Kelurahan Subdistrict	UPT/SPT Transmigration Settlement Unit/Entity of Transmigration Settlement	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	285	2	–	287
Merangin	205	10	–	215
Sarolangun	150	9	–	159
Batang Hari	110	14	–	124
Muaro Jambi	150	5	–	155
Tanjung Jabung Timur	73	20	–	93
Tanjung Jabung Barat	114	20	–	134
Tebo	122	7	–	129
Bungo	141	12	–	153
Kota Jambi	–	68	–	68
Kota Sungai Penuh	65	4	–	69
Provinsi Jambi	1.415	171	–	1.586

**Tabel**
Table

1.3

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan di Provinsi Jambi, 2025**Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Village Location to Forest Area in Jambi Province, 2025**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Dalam Hutan <i>Inside Forest Area</i>	Tepi/Sekitar Hutan <i>Edge/Around Forest Area</i>	Luar Hutan <i>Outside Forest Area</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	–	79	208	287
Merangin	5	59	151	215
Sarolangun	–	46	113	159
Batang Hari	–	6	118	124
Muaro Jambi	–	13	142	155
Tanjung Jabung Timur	–	12	81	93
Tanjung Jabung Barat	2	17	115	134
Tebo	–	27	102	129
Bungo	–	12	141	153
Kota Jambi	–	–	68	68
Kota Sungai Penuh	–	4	65	69
Provinsi Jambi	7	275	1.304	1.586



Tabel 1.4 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Lokasi Desa Terhadap Laut di Provinsi Jambi, 2025
Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Location of Village Toward the Sea in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tepi Laut Coastal Area	Bukan Tepi Laut Non-Coastal Area	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	–	287	287
Merangin	–	215	215
Sarolangun	–	159	159
Batang Hari	–	124	124
Muaro Jambi	–	155	155
Tanjung Jabung Timur	24	69	93
Tanjung Jabung Barat	3	131	134
Tebo	–	129	129
Bungo	–	153	153
Kota Jambi	–	68	68
Kota Sungai Penuh	–	69	69
Provinsi Jambi	27	1.559	1.586

**Tabel**
Table

1.5

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk di Provinsi Jambi, 2025***Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Main Income Source of the Majority of Population in Jambi Province, 2025***

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Industri <i>Manufacturing</i>	Jasa <i>Service</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	280	–	7	287
Merangin	197	10	8	215
Sarolangun	149	3	7	159
Batang Hari	118	–	6	124
Muaro Jambi	133	14	8	155
Tanjung Jabung Timur	93	–	–	93
Tanjung Jabung Barat	124	2	8	134
Tebo	127	–	2	129
Bungo	140	–	13	153
Kota Jambi	–	12	56	68
Kota Sungai Penuh	40	1	28	69
Provinsi Jambi	1.401	42	143	1.586



Tabel
Table

1.6

Banyaknya Desa/Kelurahan yang Sebagian Besar Penduduknya Bekerja pada Sektor Pertanian Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sub Sektor Utama di Provinsi Jambi, 2025
Number of Villages/Subdistricts that the Majority of Population Work in Agricultural Sector By Regency/Municipality and Main Type of Sub-Sector in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tanaman Pangan Food Crops	Tanaman Perkebunan Estate Crops	Tanaman Hortikultura Horticulture Crops	Peternakan Livestock	Perikanan Fishery	Kehutanan Forestry	Jasa Pertanian Agricultural Service	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kerinci	159	60	61	–	–	–	–	280
Merangin	7	3	187	–	–	–	–	197
Sarolangun	24	–	124	1	–	–	–	149
Batang Hari	2	–	115	–	1	–	–	118
Muaro Jambi	6	8	114	–	5	–	–	133
Tanjung Jabung Timur	2	–	90	–	1	–	–	93
Tanjung Jabung Barat	2	–	121	–	1	–	–	124
Tebo	1	–	125	1	–	–	–	127
Bungo	–	–	140	–	–	–	–	140
Kota Jambi	–	–	–	–	–	–	–	–
Kota Sungai Penuh	35	1	1	–	3	–	–	40
Provinsi Jambi	238	72	1.078	2	11	–	–	1.401

Jumlah desa/kelurahan yang **terdapat penerangan** di jalan utama desa sebanyak **1.506** desa/kelurahan.

The number of villages/subdistricts that have lighting on the main village roads is 1,506 villages/subdistricts.

Jumlah desa/kelurahan yang **tidak terdapat penerangan** di jalan utama desa sebanyak **80** desa/kelurahan.

The number of villages/subdistricts that have not lighting on the main village roads is 80 villages/subdistricts.

3 Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Paling Banyak Digunakan oleh Sebagian Besar Keluarga di Desa/Kelurahan

3 Types of Cooking Fuel Most Commonly Used by Most Families in Villages/Subdistricts

1



Elpiji 3 kg/3kg-LPG
1.539 desa/kelurahan
villages/subdistricts

Kayu Bakar/Firewood
36 desa/kelurahan
villages/subdistricts



2

3



Gas Kota/City Gas
10 desa/kelurahan
villages/subdistricts

Pencemaran Lingkungan Hidup
Environmental Pollution

Pencemaran Air
Water Pollution



407 desa/kelurahan
villages/subdistricts

Pencemaran Tanah
Land Pollution



43 desa/kelurahan
villages/subdistricts

Pencemaran Udara
Air Pollution



40 desa/kelurahan
villages/subdistricts



Penjelasan Teknis Perumahan dan Lingkungan

1. Keluarga Pengguna Listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik yang disalurkan oleh PLN dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN.
2. Keluarga Pengguna Listrik Non-PLN adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik selain PLN, misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, atau listrik swadaya masyarakat.
3. Keluarga Bukan Pengguna Listrik adalah keluarga yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk penerangan rumah.
4. Jalan Utama Desa adalah jalan yang dianggap oleh sebagian besar penduduk desa/kelurahan setempat sebagai jalan yang paling penting atau paling sering digunakan untuk arus transportasi dari/menjujur kantor camat terdekat.
5. Sumber Penerangan Jalan Utama Desa adalah jenis penerangan dan sumber pembiayaan penerangan yang ada di jalan utama desa. Dikelompokkan menjadi: listrik diusahakan oleh pemerintah, listrik non-pemerintah, dan non-listrik.

Technical Notes Settlement and Environment

1. *Family of PLN (State Electricity Company) Electric Consumer is user family/customer of electricity supplied by State Electricity Company with or without official meter.*
2. *Family of Electric Consumer of NonState Electricity Company (Non-PLN) is user family/customer of electricity supplied besides by National Electricity Company, eg diesel/ generator, power cultivated by the local government, private, and electricity based on community.*
3. *Non-Electricity Consuming Family is family that do not use electricity as a source of energy for home lighting.*
4. *The Main Village Road is a road that is considered by most of the local village/subdistrict residents as the most important or most frequently used road for transportation from/to the nearest subdistrict office.*
5. *The Source of Lighting for the Main Village Road is the type of lighting and funding sources for lighting on the village's main roads. They are grouped into: government-provided electricity, non-government-provided electricity, and non-electricity.*



6. Bahan Bakar adalah jenis bahan yang digunakan untuk memasak oleh mayoritas keluarga di desa/kelurahan.
 7. Pencemaran Lingkungan Hidup (Polusi) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
 8. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah upaya memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui serangkaian kegiatan yang sistematis dan terpadu, seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
 9. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi (Perpres Nomor 98 Tahun 2021).
 10. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk
6. *Fuel is the type of material that is used for cooking by the majority of families in village/ subdistrict.*
 7. *Environmental Pollution is the introduction or introduction of living things, substances, energy, and/or other components into the environment by human activities, thereby exceeding established environmental quality standards.*
 8. *Environmental Preservation is an effort to maintain the continuity of the environment's carrying capacity and carrying capacity through a series of systematic and integrated activities, such as planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement (Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management).*
 9. *Climate Change Mitigation is a control effort to reduce the risks caused by climate change through activities that reduce emissions or increase the absorption of greenhouse gases (GHG) and the storage/strengthening of carbon stocks from various emission sources (Presidential Regulation Number 98 of 2021).*
 10. *Climate Change Adaptation is an effort undertaken to increase the ability to adapt to climate change, including climate variability and extreme events,*



keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi (Perpres Nomor 98 Tahun 2021).

so that potential damage from climate change is reduced, opportunities posed by climate change can be exploited, and consequences arising from climate change can be addressed (Presidential Regulation Number 98 of 2021).

11. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025).

11. Mangroves are coastal vegetation with a distinctive morphology and root system that adapts to tidal areas with mud or sandy mud substrates (Government Regulation (PP) Number 27 of 2025).

12. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon pada Kawasan Hutan, untuk mengembalikan fungsi Hutan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2020).

12. Reforestation is the planting of tree species in forest areas to restore forest function (Government Regulation (PP) Number 26 of 2020).

13. Pengolahan/Daur Ulang Sampah/Limbah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

13. Waste Processing/Recycling is a systematic, comprehensive, and continuous activity that includes waste reduction and handling (Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management).

14. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia

14. Organic Fertilizer is a fertilizer derived partly or wholly from plants and/or animals that have undergone an engineering process. It can be in solid or liquid form and is used to supply organic matter to improve the physical, chemical, and biological properties



dan biologi tanah (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2006).

of the soil (Minister of Agriculture Regulation Number 2 of 2006).

15. Lubang Resapan Biopori adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah, dengan diameter 10–25 cm dan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009).

15. Biopore Infiltration Holes are holes dug perpendicular (vertical) into the ground, with a diameter of 10–25 cm and a depth of approximately 100 cm, or not exceeding the groundwater level (Minister of Environment Regulation Number 12 of 2009).

16. Energi Baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. (Undang-undang No.30/2007 Tentang Energi).

16. New Energy is energy derived from new energy sources. Renewable energy sources are energy sources generated from sustainable energy resources if properly managed, including geothermal, wind, bioenergy, sunlight, water and waterfalls, as well as the movement and temperature differences of the ocean floor. (Law No. 30/2007 concerning Energy)

17. Pola Tanam adalah usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode waktu tertentu termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu (Badan Pengkajian Teknologi Pertanian, 2017).

17. Crop Patterns are planting practices on a plot of land by arranging the layout and sequence of crops over a specific period, including a period of tillage and a period of no planting (Agricultural Technology Assessment Agency, 2017).

18. Penampungan Air Hujan (PAH) adalah bangunan tempat menampung air hujan untuk memenuhi kebutuhan air minum pada sepanjang musim, baik secara individual atau komunal (Bappenas - Departemen PU, 2008).

18. Rainwater Reservoir (PAH) is a structure used to collect rainwater to meet drinking water needs throughout the season, either individually or communally (Bappenas - Department of Public Works, 2008).



19. Terasering atau Sengkedan adalah metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah (Balittanah Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian).

19. *Terracing or Swales is a conservation methods that involve creating terraces to reduce slope length, retain water, thereby reducing the speed and amount of surface runoff, and increasing the opportunity for water absorption by the soil (Balittanah Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian).*

<https://jambi.bps.go.id>

Tabel
Table

2.1

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Bukan Pengguna Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025

Number of Villages/Subdistricts with Presence of Family of Electric Consumer and Non Electric Consumer by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Keluarga Pengguna Listrik Electric Consumer Families		Keluarga Bukan Pengguna Listrik ¹ Non Electric Consumer Families ¹
	PLN State Electricity Company	Non PLN Non-State Electricity Company	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	286	13	30
Merangin	208	55	20
Sarolangun	158	22	15
Batang Hari	124	36	30
Muaro Jambi	155	21	25
Tanjung Jabung Timur	93	53	44
Tanjung Jabung Barat	134	47	58
Tebo	129	28	28
Bungo	153	17	12
Kota Jambi	68	–	1
Kota Sungai Penuh	69	2	8
Provinsi Jambi	1.577	294	271

Catatan: ¹ Mencakup desa/kelurahan yang sama sekali tidak ada keluarga pengguna listrik atau yang terdapat keluarga pengguna listrik, masih ada keluarga bukan pengguna listrik.

Note: ¹ Includes villages/subdistricts where all families are non electric consumers, as well as villages/subdistricts where some families are non electric consumers.



Tabel
Table

2.2

**Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Jalan Utama
Desa di Provinsi Jambi, 2025**
**Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Source of Lighting for the
Main Village Road in Jambi Province, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Listrik Pemerintah Government- Provided Electricity	Listrik Non Pemerintah Non Government- Provided Electricity	Non Listrik Non Electricity	Tidak Ada Penerangan No Lighting	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	263	17	–	7	287
Merangin	151	31	–	33	215
Sarolangun	87	56	–	16	159
Batang Hari	121	1	–	2	124
Muaro Jambi	148	5	–	2	155
Tanjung Jabung Timur	55	23	–	15	93
Tanjung Jabung Barat	126	6	–	2	134
Tebo	122	5	–	2	129
Bungo	150	3	–	–	153
Kota Jambi	68	–	–	–	68
Kota Sungai Penuh	68	–	–	1	69
Provinsi Jambi	1.359	147	–	80	1.586

**Tabel**
Table 2.3

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan Sebagian Besar Keluarga di Provinsi Jambi, 2025
Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Cooking Fuel Used by Majority of Families in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Listrik Electricity	Elpiji 5,5 kg 5.5 kg-LPG	Elpiji 12 kg 12 kg-LPG	Elpiji 3 kg 3 kg-LPG	Gas Kota City Gas	Biogas Biogas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	–	–	–	273	–	–
Merangin	–	–	1	200	–	–
Sarolangun	–	–	–	147	5	–
Batang Hari	–	–	–	124	–	–
Muaro Jambi	–	–	–	154	1	–
Tanjung Jabung Timur	–	–	–	93	–	–
Tanjung Jabung Barat	–	–	–	134	–	–
Tebo	–	–	–	129	–	–
Bungo	–	–	–	153	–	–
Kota Jambi	–	–	–	64	4	–
Kota Sungai Penuh	–	–	–	68	–	–
Provinsi Jambi	–	–	1	1.539	10	–



Lanjutan Tabel 2.3
Continued Table

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Minyak Tanah <i>Kerosene</i>	Briket <i>Briquettes</i>	Arang <i>Charcoal</i>	Kayu Bakar <i>Firewood</i>	Lainnya <i>Others</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kerinci	–	–	–	14	–	287
Merangin	–	–	–	14	–	215
Sarolangun	–	–	–	7	–	159
Batang Hari	–	–	–	–	–	124
Muaro Jambi	–	–	–	–	–	155
Tanjung Jabung Timur	–	–	–	–	–	93
Tanjung Jabung Barat	–	–	–	–	–	134
Tebo	–	–	–	–	–	129
Bungo	–	–	–	–	–	153
Kota Jambi	–	–	–	–	–	68
Kota Sungai Penuh	–	–	–	1	–	69
Provinsi Jambi	–	–	–	36	–	1.586

**Tabel**
Table

2.4

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Agen/Penjual Bahan Bakar di Provinsi Jambi, 2025***Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Availability of Agent/Seller of Fuel in Jambi Province, 2025***

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Minyak Tanah <i>Kerosene</i>	LPG <i>LPG</i>	Tidak Ada <i>None</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	199	286	–
Merangin	95	214	1
Sarolangun	21	159	–
Batang Hari	8	121	3
Muaro Jambi	60	155	–
Tanjung Jabung Timur	22	92	1
Tanjung Jabung Barat	12	134	–
Tebo	58	129	–
Bungo	124	153	–
Kota Jambi	27	68	–
Kota Sungai Penuh	63	68	–
Provinsi Jambi	689	1.579	5



Tabel 2.5 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi, 2025
Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Environmental Pollution in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pencemaran Air Water Pollution	Pencemaran Tanah Soil Pollution	Pencemaran Udara Air Pollution	Tidak Ada Pencemaran No Pollution
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	78	–	–	209
Merangin	70	13	1	145
Sarolangun	54	3	2	105
Batang Hari	8	2	2	113
Muaro Jambi	15	2	11	134
Tanjung Jabung Timur	7	–	4	84
Tanjung Jabung Barat	11	3	10	115
Tebo	36	–	1	93
Bungo	80	19	8	67
Kota Jambi	19	1	1	48
Kota Sungai Penuh	29	–	–	40
Provinsi Jambi	407	43	40	1.153

**Tabel**
Table 2.6**Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Kabupaten/ Kota dan Sumber Utama Pencemaran di Provinsi Jambi, 2025****Number of Villages/Subdistricts with Environmental Pollution by Regency/Municipality and Main Source of Pollution in Jambi Province, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sumber Pencemaran Air The Source of Water Pollution			Sumber Pencemaran Tanah The Source of Soil Pollution			Sumber Pencemaran Udara The Source of Air Pollution		
	Rumah Tangga Domestic	Pabrik/ Industri/ Usaha Factory/ Industry/ Business	Lainnya Others	Rumah Tangga Domestic	Pabrik/ Industri/ Usaha Factory/ Industry/ Business	Lainnya Others	Rumah Tangga Domestic	Pabrik/ Industri/ Usaha Factory/ Industry/ Business	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kerinci	72	6	–	–	–	–	–	–	–
Merangin	3	63	4	–	13	–	–	1	–
Sarolangun	10	36	8	2	1	–	–	2	–
Batang Hari	1	7	–	–	–	2	–	2	–
Muaro Jambi	5	8	2	–	–	2	1	8	2
Tanjung Jabung Timur	5	2	–	–	–	–	1	3	–
Tanjung Jabung Barat	4	7	–	–	3	–	–	9	1
Tebo	2	33	1	–	–	–	–	1	–
Bungo	2	67	11	–	17	2	–	8	–
Kota Jambi	17	2	–	1	–	–	–	–	1
Kota Sungai Penuh	27	1	1	–	–	–	–	–	–
Provinsi Jambi	148	232	27	3	34	6	2	34	4



Tabel
Table

2.7

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan di Provinsi Jambi, 2025
Number Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and the Existence of Environmental Management and Conservation Activities in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Penanaman/Pemeliharaan Pohon dan Mangrove Planting/Maintenance of Trees and Mangroves		Pengolahan/Daur Ulang Sampah/Limbah Waste Processing/Recycling		Penggalaan Penggunaan Pupuk Organik Promoting the Use of Organic Fertilizers	
	Ada Available	Tidak Ada None	Ada Available	Tidak Ada None	Ada Available	Tidak Ada None
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	36	251	62	225	130	157
Merangin	7	208	7	208	95	120
Sarolangun	15	144	3	156	53	106
Batang Hari	4	120	1	123	74	50
Muaro Jambi	11	144	12	143	68	87
Tanjung Jabung Timur	16	77	3	90	28	65
Tanjung Jabung Barat	7	127	7	127	56	78
Tebo	6	123	2	127	30	99
Bungo	13	140	10	143	79	74
Kota Jambi	5	63	25	43	14	54
Kota Sungai Penuh	14	55	22	47	56	13
Provinsi Jambi	134	1.452	154	1.432	683	903

**Tabel**
Table

2.8

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Jambi, 2025**Number Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and the Existence of Climate Change Adaptation and Mitigation Activities in Jambi Province, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pembuatan Lubang Biopori Making Biopore Holes		Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Utilisation of New and Renewable Energy		Penerapan Pola Tanam Implementation of Cropping Patterns	
	Ada Available	Tidak Ada None	Ada Available	Tidak Ada None	Ada Available	Tidak Ada None
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	12	275	76	211	127	160
Merangin	–	215	35	180	84	131
Sarolangun	2	157	4	155	49	110
Batang Hari	1	123	22	102	67	57
Muaro Jambi	–	155	–	155	44	111
Tanjung Jabung Timur	–	93	22	71	61	32
Tanjung Jabung Barat	2	132	12	122	41	93
Tebo	–	129	2	127	31	98
Bungo	1	152	10	143	85	68
Kota Jambi	8	60	1	67	15	53
Kota Sungai Penuh	2	67	18	51	33	36
Provinsi Jambi	28	1.558	202	1.384	637	949



Lanjutan Tabel 2.8
Continued Table

Kabupaten/Kota Regency/Municipality (1)	Penampungan/Pemanenan Air Hujan Rainwater Harvesting/Collection		Pembuatan/Pemeliharaan Terasering Construction/Maintenance of Terraces	
	Ada Available (8)	Tidak Ada None (9)	Ada Available (10)	Tidak Ada None (11)
Kerinci	96	191	25	262
Merangin	97	118	25	190
Sarolangun	1	158	1	158
Batang Hari	7	117	11	113
Muaro Jambi	5	150	–	155
Tanjung Jabung Timur	62	31	–	93
Tanjung Jabung Barat	31	103	8	126
Tebo	–	129	2	127
Bungo	14	139	3	150
Kota Jambi	2	66	1	67
Kota Sungai Penuh	16	53	1	68
Provinsi Jambi	331	1.255	77	1.509

Pendidikan dan kesehatan

Education and Health



93,76%

PERSENTASE DESA/KELURAHAN TERDAPAT SD/MI
PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WITH ELEMENTARY SCHOOL

PERSENTASE DESA/KELURAHAN TERDAPAT SMP/MTS
PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WITH JUNIOR HIGH SCHOOL

51,32%



25,03%

PERSENTASE DESA/KELURAHAN TERDAPAT SMA/MA
PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WITH SENIOR HIGH SCHOOL

PERSENTASE DESA/KELURAHAN TERDAPAT RUMAH SAKIT
PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WITH HOSPITAL

2,59%

13,18%

PERSENTASE DESA/KELURAHAN TERDAPAT PUSKESMAS
PERCENTAGE OF VILLAGES/SUBDISTRICTS WITH PUBLIC HEALTH CENTER





Penjelasan Teknis Pendidikan dan Kesehatan

1. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui/disahkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah.
2. Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
3. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
4. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
5. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang

Technical Notes Education and Health

1. *Educational Institutions are institutions that produce students who graduate and are recognized/approved by the Ministry of Primary and Secondary Education and the Ministry of Higher Education, Science, and Technology, as evidenced by certificates/diplomas.*
2. *The Formal Education Level consists of primary education, secondary education, and higher education. The kind of education taught consists of general education, vocational, academic, professional, religious, and special education.*
3. *The Primary Education consists of Elementary School and Islamic Elementary School or other equivalent forms and Junior High School and Madrasah Tsanawiyah (MTs), or other equivalent forms.*
4. *The Secondary Education consists of Senior High School (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Vocational School (SMK), and Vocational Madrasah Aliyah (MAK), or other equivalent forms.*
5. *The Higher Education is the education level after secondary education that consists of diploma, bachelor, master, specialist, and doctoral degrees that are held by the higher education institution*



diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

6. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; dan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang.
7. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
8. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik secara komprehensif.
9. Balai Kesehatan merupakan jenis fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat

(college). The Higher Education Institutions can be academy, polytechnic, high school, institute, or university.

6. According to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2024 concerning the Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health, health care facilities include primary care facilities, advanced care facilities, and supporting care facilities.
7. A Hospital is an advanced-level healthcare facility that provides comprehensive individual health services through promotive, preventive, curative, rehabilitative, and/or palliative healthcare services, including inpatient, outpatient, and emergency care (Law No. 17 of 2023 concerning Health).
8. A Clinic is a health care facility that provides comprehensive basic and/or specialist medical services.
9. A Health Center is a type of advanced referral health care facility that provides public health services or health support services. In addition to providing public



atau pelayanan penunjang kesehatan. Selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, balai kesehatan dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan. Balai dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/34/2018 tentang Balai sebagai Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan).

health services, centers can also provide individual health services. A Health Centre can be operated by the Central Government, Regional Governments, or the community (Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. HK.01.07/MENKES/34/2018 concerning Centers as a Type of Health Service Facility).

10. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

10. A Community Health Center (Puskesmas) is a primary-level healthcare facility that organizes and coordinates promotive, preventive, curative, rehabilitative, and/or palliative health services, prioritizing promotive and preventive services in its working area (Law No. 17 of 2023 concerning Health).

11. Puskesmas dengan Rawat Inap adalah puskesmas yang diberi tambahan sumber daya kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal termasuk pelayanan obstetrik neonatal emergency dasar (PONED), dan pelayanan rawat inap lainnya. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat).

11. A Community Health Center (Puskesmas) with Inpatient Care is a community health center (puskesmas) that has been given additional health resources to provide inpatient care for normal delivery services, including basic emergency obstetric and neonatal care, and other inpatient services. (Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 19 of 2024 concerning Community Health Centers).

12. Puskesmas Non Rawat Inap adalah puskesmas yang menyelenggarakan

12. Non-inpatient community health centers are community health centers



pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah, pelayanan persalinan normal, dan pelayanan gawat darurat. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat).

that provide outpatient services, home care, normal delivery services, and emergency services. (Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 19 of 2024 concerning the Implementation of Community Health Centers).

13. Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan salah satu bentuk unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang mengoordinasikan urusan kesehatan di desa/kelurahan, termasuk pemberian pelayanan kesehatan primer dan peningkatan partisipasi masyarakat pada tingkat desa/kelurahan. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan.

13. A Auxiliary Health Centers (Pustu) is a health service unit at the village/sub-district level that coordinates health affairs in the village/sub-district, including the provision of primary health care and increasing community participation at the village/sub-district level. The Pustu provides outpatient services and is accountable to the main community health center in the sub-district.

14. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan).

14. A Primary Clinic is a clinic that provides basic medical services. (Minister of Health Regulation Number 14 of 2021 concerning Standards for Business Activities and Products in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Health Sector).

15. Praktik mandiri dokter adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek.

15. An independent physician's practice is a healthcare facility/building used as a physician's practice that typically provides outpatient services, including physician practices that have inpatient facilities and a pharmacy.

16. Praktik mandiri bidan adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan

16. An independent midwife practice is a health facility/building used as a



untuk tempat praktik bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.

midwife's practice location which usually provides services to pregnant women and babies.

17. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) adalah sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan. Poskesdes merupakan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan di lingkungannya dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Poskesdes dikelola oleh bidan dan dibantu beberapa kader.
17. *Village Health Posts (Poskesdes) are health facilities/buildings established in villages/sub-districts to bring basic health services closer to the community. Poskesdes are a Community-Based Health Initiative (UKBM) that allows communities to play an active role in improving the health of their communities by providing early warning of various health risks and problems. Poskesdes are managed by midwives and assisted by several cadres.*
18. Polindes (Pondok Bersalin Desa) adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompetensi teknis bidan tersebut.
18. *Polindes (Village Maternity Post) is a building constructed with government funding and community participation to provide delivery assistance and accommodation for women in labor, as well as housing for village midwives. In addition to providing delivery assistance, it also provides maternal and child health (KIA) services, family planning (KB), and other health services according to community needs and the midwives' technical competence.*
19. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Apotek).
19. *A Pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmacists practice pharmacy (Minister of Health Regulation Number 26 of 2018 concerning Pharmacies).*



20. Toko Khusus Obat/Jamu adalah tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan menyimpan, dan menjual obat/bahan khusus untuk obat/jamu. Toko obat/jamu melayani pembelian obat-obatan bebas terbatas dan juga obat bebas.
21. Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/ kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa. Posyandu memiliki tugas membantu kepala desa/lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan Pelayanan Kesehatan masyarakat di desa/kelurahan (Permenkes No 19 Tahun 2024).
22. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), yang saat ini dikenal Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular) merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik (Juknis Pelaksanaan Posbindu, Kemenkes, 2012).
20. *A Traditional Drug Store is a designated location dedicated to storing and selling specific drugs/ingredients for drugs/herbal medicine. Drug/herbal medicine stores offer non-prescription and limited over-the-counter (OTC) medicine.*
21. *Posyandu (Integrated Health Post) is part of a village/subdistrict community organization that serves as a forum for community participation and partners with the village/subdistrict government in planning, implementing, and monitoring development and improving village services. Posyandu's role is to assist the village/subdistrict head in empowering the community, participating in development planning and implementation, and improving public health services in the village/subdistrict (Minister of Health Regulation No. 19 of 2024).*
22. *Integrated Guidance Post (Posbindu), currently known as Posbindu PTM (Integrated Non-Communicable Disease Post), is a community participation in carrying out early detection activities and monitoring of the main PTM risk factors which are carried out in an integrated, routine and periodic manner (Technical Guidelines for Implementing Posbindu, Ministry of Health, 2012).*



Tabel
Table

3.1

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Pendidikan Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Sarana Pendidikan di Provinsi Jambi, 2025
Number of Villages/Subdistricts with Availability Educational Facilities by Regency/ Municipality and Type of Educational Facilities in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	TK/RA/BA Kindergarten	SD/MI Elementary School	SMP/MTS Junior High School	SMA/MA Senior High School	SMK Vocational High School	Akademi/ Perguruan Tinggi Academy/ University
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	105	221	75	25	8	1
Merangin	186	212	112	41	21	3
Sarolangun	136	157	92	40	23	3
Batang Hari	120	123	65	32	10	1
Muaro Jambi	122	151	96	42	18	3
Tanjung Jabung Timur	46	92	59	31	7	1
Tanjung Jabung Barat	58	129	85	54	12	2
Tebo	96	129	87	48	25	2
Bungo	108	153	80	39	18	4
Kota Jambi	61	63	47	37	22	16
Kota Sungai Penuh	36	57	16	8	4	6
Provinsi Jambi	1.074	1.487	814	397	168	42

**Tabel**
Table 3.2**Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Sarana Kesehatan di Provinsi Jambi, 2025****Number of Villages/Subdistricts with by Availability of Health Facilities by Regency/ Municipality and Type of Health Facilities in Jambi Province, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Rumah Sakit Hospital	Klinik Utama Principal Clinic	Balai Kesehatan Health Center	Puskesmas ¹ Community Health Center ¹	Puskesmas Pembantu Auxiliary Health Centers	Klinik Pratama Primary Clinic
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	1	1	–	21	47	1
Merangin	2	3	–	27	81	13
Sarolangun	2	–	–	16	53	6
Batang Hari	2	2	–	18	61	5
Muaro Jambi	3	–	–	23	91	6
Tanjung Jabung Timur	2	–	–	17	57	2
Tanjung Jabung Barat	2	1	–	17	73	16
Tebo	2	–	–	20	35	10
Bungo	5	3	–	19	55	10
Kota Jambi	17	12	–	20	34	35
Kota Sungai Penuh	3	2	–	11	3	5
Provinsi Jambi	41	24	–	209	590	109



Lanjutan Tabel 3.2
Continued Table

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Praktik Mandiri Dokter <i>Independent Physician Practice</i>	Praktik Mandiri Bidan <i>Independent Midwife Practice</i>	Poskesdes <i>Village Health Post</i>	Polindes <i>Village Maternity Post</i>	Apotek <i>Pharmacy</i>	Toko Khusus Obat/Jamu <i>Traditional Drugs Store</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kerinci	51	151	67	8	36	32
Merangin	45	87	110	85	40	43
Sarolangun	25	117	115	34	29	18
Batang Hari	25	70	70	20	18	16
Muaro Jambi	38	110	20	88	36	28
Tanjung Jabung Timur	18	69	23	28	18	18
Tanjung Jabung Barat	24	66	88	–	23	23
Tebo	31	118	95	10	38	33
Bungo	32	123	70	14	37	13
Kota Jambi	51	44	5	–	57	47
Kota Sungai Penuh	28	32	7	–	17	5
Provinsi Jambi	368	987	670	287	349	276

Catatan: ¹ Puskesmas mencakup puskesmas dengan rawat inap dan puskesmas tanpa rawat inap.

Note: ¹ Public Health Center includes public health center with hospitalization and without hospitalization.

**Tabel**
Table 3.3**Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kegiatan Posyandu dan Posbindu Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi, 2025*****Number of Villages/Subdistricts with Integrated Health Post and Integrated Development Post Activities by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025***

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kegiatan Posyandu <i>The Activity of Integrated Health Post</i>		Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) <i>Integrated Guidance Post</i>
	Setiap Sebulan Sekali <i>Once in a Month</i>	Setiap 2 Bulan/Lebih <i>Once in at Least Two Months</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	286	8	196
Merangin	215	25	139
Sarolangun	159	19	65
Batang Hari	124	4	37
Muaro Jambi	155	5	72
Tanjung Jabung Timur	93	6	57
Tanjung Jabung Barat	133	5	86
Tebo	129	4	59
Bungo	153	1	94
Kota Jambi	68	–	53
Kota Sungai Penuh	69	–	–
Provinsi Jambi	1.584	77	858

Angkutan, Komunikasi, dan Informasi *Transportation, Communication, and Information*

ANGKUTAN UMUM DI DESA/KELURAHAN *PUBLIC TRANSPORTATION IN VILLAGES/SUBDISTRICTS*

87,77% Desa/kelurahan ada transportasi umum
Villages/subdistricts accessible by public transportation



14,50% Desa/kelurahan ada angkutan online
Villages/subdistricts accessible by online transportation



SINYAL TELEPON DAN SINYAL INTERNET DI DESA/KELURAHAN *PHONE AND INTERNET SIGNAL IN VILLAGES/SUBDISTRICTS*

Persentase Desa/Kelurahan Menurut Kekuatan Sinyal Telepon Seluler di Sebagian Besar Wilayah
Percentage of Villages/Subdistricts by the Strength of Cellular Phone Signal in Most Areas



Sangat Kuat 21,94%
Very Strong 21,94%

Kuat 64,88%
Strong 64,88%

Lemah 12,23% **Tidak Ada 0,95%**
Weak 12,23% *No Signal 0,95%*

Persentase Desa/Kelurahan Menurut Kekuatan Sinyal Internet di Sebagian Besar Wilayah
Percentage of Villages/Subdistricts by the Strength of Internet Signal in Most Areas



3G/H/H+/EVDO 6,68%

3G/H/H+/EVDO 6,68%

2,5G/E/GPRS 1,89%

2,5G/E/GPRS 1,89%

Tidak Ada 1,20%

No Signal 1,20%

5G/4G/LTE 90,23%

5G/4G/LTE 90,23%



SARANA KOMUNIKASI DI DESA/KELURAHAN *COMMUNICATION FACILITIES IN VILLAGES/SUBDISTRICTS*



7,19% Desa/kelurahan ada kantor pos/pos pembantu/rumah pos
Villages/subdistricts with post office/sub-post office/post house



10,53% Desa/kelurahan ada layanan pos keliling
Villages/subdistricts with mobile postal service



13,68% Desa/kelurahan ada perusahaan/agen jasa ekspedisi swasta
Villages/subdistricts with private expedition service



Penjelasan Teknis Angkutan, Komunikasi, dan Informasi

1. Prasarana Transportasi adalah sarana penunjang lalu lintas pemindahan orang dan/atau barang, yang terdiri atas jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan lain-lain yang digunakan oleh warga desa untuk mobilitas dari dan ke desa terdekat.
2. Angkutan Umum adalah sarana angkutan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan).
3. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang atau orang dan barang, yang mempunyai titik asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
4. Ketersediaan Angkutan Online di desa adalah kemampuan warga desa/ kelurahan untuk mengakses dan memesan layanan transportasi daring berbasis aplikasi (misalnya Gojek, Grab, Maxim, dan lainnya).
5. Jenis Permukaan Jalan Terluas adalah jenis permukaan jalan terluas yang ada

Technical Notes Transportation, Communica- tion, and Information

1. *Transportation Infrastructure is defined as supporting facilities for the movement of people and/or goods, including roads, bridges, docks, ports, and other facilities that are utilized by villagers to ensure mobility to and from the nearest villages.*
2. *Public Transportation is a type of transportation for the movement of people and/or goods from one place to another using motor vehicles provided for public use on a fare-paying basis (Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 41 of 1993 on Road Transportation)."*
3. *Route is the designated path used by public vehicles in passenger-and-goods transport services, characterized by fixed point of origin and destination, a fixed path, and either a fixed or non-fixed timetable.*
4. *The Availability of Online Transportation in villages refers to the ability of villagers/subdistrict residents to access and order online transportation services based on applications (e.g. Gojek, Grab, Maxim, and others).*
5. *Type of Widest Road Surface is the widest road surface in the village/subdistrict.*



di desa/kelurahan. Jenis permukaan jalan terdiri dari: aspal/beton, diperkeras (dengan kerikil atau batu), tanah, dan lainnya yaitu terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa, termasuk jalan setapak, jalan di hutan dan sejenisnya.

The types of road surface including: asphalt/concrete, pebble (with gravel or stone), land, and others : such as made of wood/board that is usually used in swamp areas, including walkways, forest roads, etc.

6. *Base Transceiver Station (BTS)* adalah alat yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima (transceiver) sinyal komunikasi seluler. Biasanya BTS ditandai adanya menara/tower yang dilengkapi antena sebagai perangkat transceiver.

6. *Cellular Phone Tower or Base Transceiver Station (BTS)* is a tool that serves as the sender and receiver (transceiver) of cellular communication signals. Usually, BTS is marked with a tower equipped with antenna as transceiver devices.

7. Sinyal telepon seluler adalah besaran elektromagnetik yang berubah dalam ruang dan waktu dengan membawa informasi yang memberikan konfirmasi bahwa layanan telepon seluler sudah tersedia.

7. *Cellphone signal* is electromagnetic quantities that change in space and time by bringing information that confirms when the cell phone services are available.

8. Sinyal internet telepon seluler adalah jaringan sistem data paket internet dengan kecepatan transfer data tertentu. Paket data disini biasanya digunakan dalam melakukan akses internet. Protokol transfer data ini mengalami beberapa perubahan mulai dari yang kecepatannya rendah sampai tinggi yaitu 2,5G/E/GPRS, 3G/H/H+/EVDO, hingga 5G/4G/LTE.

8. *Cellphone internet signal* is an internet package data system network with certain data transfer speeds. Data packages here are usually used to access the internet. This data transfer protocol has undergone several changes ranging from low to high speeds, namely 2,5G/E/GPRS, 3G/H/H+/EVDO, to 5G/4G/LTE.

9. Kantor Pos adalah tempat pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos

9. *Post Office* is a service provider place of written communication and or electronic mail, parcel service, logistics services, financial transaction services, postal and agency services to the public.



untuk kepentingan umum. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

Postal house has the same function as the post office and subsidiary of post office, the difference is that postal house usually located in remote areas.

10. Pos Keliling adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu.
11. Perusahaan Jasa Agen Ekspedisi Swasta adalah pelayanan pengiriman paket maupun dokumen yang dikelola oleh pihak swasta, misalnya Tiki, JNE, ESL, dll.

10. *Mobile Postal Service is nomadic postal service (to sell, send, and receive postal stationery) by car or transportation facility that the functions are the same as the post office or subsidiary of post office.*
11. *Private Expedition Service Company is packages and documents delivery service managed by privates, for example Tiki, JNE, ESL, etc.*

**Tabel**
Table

4.1

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Prasarana Transportasi di Provinsi Jambi, 2025***Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Transportation Infrastructure in Jambi Province, 2025***

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Darat Land	Air Water	Darat dan Air Land and Water	Udara Air	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	287	–	–	–	287
Merangin	215	–	–	–	215
Sarolangun	159	–	–	–	159
Batang Hari	89	1	34	–	124
Muaro Jambi	143	–	12	–	155
Tanjung Jabung Timur	54	–	39	–	93
Tanjung Jabung Barat	93	–	41	–	134
Tebo	107	–	22	–	129
Bungo	153	–	–	–	153
Kota Jambi	68	–	–	–	68
Kota Sungai Penuh	69	–	–	–	69
Provinsi Jambi	1.437	1	148	–	1.586



Tabel 4.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Ketersediaan Angkutan Umum di Provinsi Jambi, 2025
Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Availability of Public Transportation in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ada, Dengan Trayek Tetap dan Tanpa Trayek Tetap Available with Fixed Routes and without Fixed Routes	Ada, Dengan Trayek Tetap Available with Fixed Routes	Ada, Tanpa Trayek Tetap Available without Fixed Routes	Tidak Ada Angkutan Umum Not Available Public Transportation	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	53	139	85	10	287
Merangin	14	103	69	29	215
Sarolangun	11	54	68	26	159
Batang Hari	2	29	58	35	124
Muaro Jambi	6	33	76	40	155
Tanjung Jabung Timur	19	11	55	8	93
Tanjung Jabung Barat	18	72	22	22	134
Tebo	–	85	28	16	129
Bungo	7	63	75	8	153
Kota Jambi	50	–	18	–	68
Kota Sungai Penuh	57	–	12	–	69
Provinsi Jambi	237	589	566	194	1.586

**Tabel**
Table

4.3

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Ketersediaan Angkutan Online di Provinsi Jambi, 2025**Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Availability of Online Transportation in Jambi Province, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ada Available	Tidak Ada None	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	30	257	287
Merangin	–	215	215
Sarolangun	7	152	159
Batang Hari	5	119	124
Muaro Jambi	21	134	155
Tanjung Jabung Timur	–	93	93
Tanjung Jabung Barat	14	120	134
Tebo	–	129	129
Bungo	17	136	153
Kota Jambi	68	–	68
Kota Sungai Penuh	68	1	69
Provinsi Jambi	230	1.356	1.586



Tabel
Table

4.4

Banyaknya Desa/Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat atau Darat dan Air Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan Darat Terluas di Provinsi Jambi, 2025

Number of Villages/Subdistricts Used Land or Land and Water Transportation Infrastructure by Regency/Municipality and Type of the Widest Road Surface in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Aspal/Beton Asphalt/ Concrete	Diperkeras (Kerikil, Batu, dll) Pebble	Tanah Land	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	279	4	4	–	287
Merangin	142	64	9	–	215
Sarolangun	123	34	2	–	159
Batang Hari	112	9	2	–	123
Muaro Jambi	107	46	2	–	155
Tanjung Jabung Timur	40	36	17	–	93
Tanjung Jabung Barat	81	51	1	1	134
Tebo	115	14	–	–	129
Bungo	146	7	–	–	153
Kota Jambi	68	–	–	–	68
Kota Sungai Penuh	69	–	–	–	69
Provinsi Jambi	1.282	265	37	1	1.585

**Tabel**
Table

4.5

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Base Transceiver Station (BTS) di Provinsi Jambi, 2025**Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Existence of Base Transceiver Station (BTS) in Jambi Province, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ada Available	Tidak Ada None	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	80	207	287
Merangin	114	101	215
Sarolangun	86	73	159
Batang Hari	78	46	124
Muaro Jambi	110	45	155
Tanjung Jabung Timur	66	27	93
Tanjung Jabung Barat	77	57	134
Tebo	81	48	129
Bungo	96	57	153
Kota Jambi	59	9	68
Kota Sungai Penuh	18	51	69
Provinsi Jambi	865	721	1.586



Tabel
Table

4.6

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Kekuatan Sinyal Telepon Seluler di Provinsi Jambi, 2025

Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and the Strength of Cellular Phone Signal in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sangat Kuat Very Strong	Kuat Strong	Lemah Weak	Tidak Ada Sinyal No Signal	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	85	179	20	3	287
Merangin	50	114	50	1	215
Sarolangun	24	106	23	6	159
Batang Hari	21	96	7	–	124
Muaro Jambi	24	124	7	–	155
Tanjung Jabung Timur	8	62	23	–	93
Tanjung Jabung Barat	20	81	33	–	134
Tebo	16	101	12	–	129
Bungo	21	109	18	5	153
Kota Jambi	50	18	–	–	68
Kota Sungai Penuh	29	39	1	–	69
Provinsi Jambi	348	1.029	194	15	1.586

**Tabel**
Table

4.7

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Kekuatan Sinyal Internet di Provinsi Jambi, 2025***Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and the Strength of Internet Signal in Jambi Province, 2025***

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	5G/4G/LTE <i>5G/4G/LTE</i>	3G/H/H+/EVDO <i>3G/H/H+/EVDO</i>	2,5G/E/GPRS <i>2,5G/E/GPRS</i>	Tidak Ada Sinyal Internet <i>No Internet Signal</i>	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	271	6	7	3	287
Merangin	195	13	5	2	215
Sarolangun	139	8	3	9	159
Batang Hari	110	12	2	–	124
Muaro Jambi	147	8	–	–	155
Tanjung Jabung Timur	67	21	5	–	93
Tanjung Jabung Barat	117	13	4	–	134
Tebo	120	9	–	–	129
Bungo	129	15	4	5	153
Kota Jambi	68	–	–	–	68
Kota Sungai Penuh	68	1	–	–	69
Provinsi Jambi	1.431	106	30	19	1.586



Tabel 4.8 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Layanan Pos dan Ekspedisi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025
Table 4.8 *Number of Villages/Subdistricts with the Existence of Postal and Expedition Services by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kantor Pos/Pos Pembantu/ Rumah Pos Post Office/Subsidiary of Post Office	Pos Keliling Mobile Postal Service	Perusahaan Jasa Ekspedisi Swasta Private Expedition Service Company
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	10	6	14
Merangin	11	42	35
Sarolangun	6	7	23
Batang Hari	8	33	20
Muaro Jambi	19	56	19
Tanjung Jabung Timur	7	1	8
Tanjung Jabung Barat	12	6	15
Tebo	6	–	14
Bungo	8	7	18
Kota Jambi	26	9	45
Kota Sungai Penuh	1	–	6
Provinsi Jambi	114	167	217

Sarana Ekonomi dan Industri

Economic and Industrial Facilities



84,93% DESA/KELURAHAN TERDAPAT INDUSTRI MIKRO KECIL

84,93% PERCENT OF VILLAGES/SUBDISTRICTS CONTAIN SMALL MICRO INDUSTRIES



9,77% DESA/KELURAHAN TERDAPAT BANK

9,77% PERCENT OF VILLAGES/SUBDISTRICTS CONTAIN BANK

30,08% DESA/KELURAHAN TERDAPAT SARANA PERDAGANGAN DAN AKOMODASI

30,08% PERCENT OF VILLAGES/SUBDISTRICTS CONTAIN MEANS OF TRADE AND ACCOMMODATION

28,18% DESA/KELURAHAN TERDAPAT KOPERASI

28,18% PERCENT OF VILLAGES/SUBDISTRICTS CONTAIN COOPERATIVE





Penjelasan Teknis Sarana Ekonomi dan Industri

1. Minimarket/swalayan adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400 m².
2. Supermarket, atau dengan sebutan lain adalah tempat perdagangan dengan sistem pelayanan mandiri, semua barang memiliki label harga, dan luas minimal 400 m².
3. Restoran adalah usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan dan mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak.
4. Rumah Makan adalah jenis usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya dapat dilakukan diluar rumah makan, yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak.
5. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa

Technical Notes Economic and Industry Facilities

1. *Minimarket or convenience store is a self-service system that sells various types of goods at retail prices, with all goods labeled with prices, and a building area of less than 400 m².*
2. *Supermarket, or other similar establishments, is a place of commerce with a self-service system, where all goods are labeled with prices, and has a minimum area of 400 m².*
3. *Restaurant is a service business that serves food and beverages consumed on its premises, located in part or all of a permanent building, equipped with services including cooking and serving according to orders, and characterized by the fact that buyers are usually subject to tax.*
4. *Food Stall is a type of business that provides food services which food processing may be carried out outside the food stall premises, and customers are generally subject to tax.*
5. *Hotel is a type of accommodation that uses part or all of a building to provide lodging services, food and beverage services, and other services (such as restaurants, laundry, etc.) for the general*



lainnya (seperti restoran, binatu, dll) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.

public and operated commercially under a business license as a hotel.

6. Penginapan (hostel/motel/losmen/wisma) adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel.

6. *Lodging (hostel/motel/guesthouse/inn) is a type of accommodation that uses part or all of a building for lodging services for the general public, usually without food and beverage services, and is managed commercially under a business license other than a hotel license.*

7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

7. *Cooperative is a business entity consisting of individuals or legal entities based on cooperative principles and serving as a people's economic movement based on the principle of kinship.*

8. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- kemandirian.

8. *Cooperatives implement the following cooperative principles:*

- membership is voluntary and open;*
- management is conducted democratically;*
- distribution of surplus is done fairly in proportion to each member's contribution;*
- limited return on capital;*
- Independence.*

9. Fasilitas Perkreditan adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan

9. *Credit Facility is a financial arrangement that enables an individual or business*



seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Tidak termasuk pinjaman dari perorangan.

10. Industri Mikro dan Kecil adalah industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja.

entity to borrow funds for purchasing products, with repayment made over an agreed period. Loans from individuals are excluded.

10. *Micro and Small Industries are industries that have fewer than 20 workers.*

<https://jambi.bps.go.id>

**Tabel**
Table

5.1

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Perdagangan dan Akomodasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025
Number of Villages/Subdistricts with the Availability of Trade and Accommodation Facilities by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sarana Perdagangan Trading Facility		Sarana Akomodasi Accommodation Facility	
	Minimarket/Swalayan/ Supermarket	Restoran/Rumah Makan	Hotel Hotel	Penginapan Lodging
	Minimarket/Swalayan/ Supermarket	Restaurant/Food Stall		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	38	76	5	38
Merangin	28	12	5	8
Sarolangun	23	26	4	6
Batang Hari	21	19	–	4
Muaro Jambi	50	11	1	5
Tanjung Jabung Timur	11	6	2	10
Tanjung Jabung Barat	24	22	5	18
Tebo	35	21	4	4
Bungo	27	7	11	9
Kota Jambi	57	55	34	23
Kota Sungai Penuh	14	26	8	17
Provinsi Jambi	328	281	79	142



Tabel
Table

5.2

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Kelompok Pertokoan dan Pasar di Provinsi Jambi, 2025
Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and the Availability of Shopping Complexes and Markets in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kelompok Pertokoan <i>Shopping Complexs</i>	Pasar dengan Bangunan Permanen <i>Markets in Permanent Building</i>	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen <i>Markets in Semi Permanent Building</i>	Pasar tanpa Bangunan <i>Markets without Building</i>	Tidak ada Kelompok Pertokoan dan Pasar <i>No Shopping Complexs and Markets</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	17	7	17	58	202
Merangin	35	4	70	17	128
Sarolangun	19	8	23	33	95
Batang Hari	11	21	23	13	72
Muaro Jambi	20	7	30	10	101
Tanjung Jabung Timur	5	10	12	15	58
Tanjung Jabung Barat	8	15	43	30	57
Tebo	31	23	40	6	62
Bungo	22	11	43	5	86
Kota Jambi	54	12	12	2	13
Kota Sungai Penuh	6	2	3	8	56
Provinsi Jambi	228	120	316	197	930

**Tabel**
Table

5.3

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Bank di Provinsi Jambi, 2025**Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and the Availability of Bank in Jambi Province, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jenis Bank The Type of Bank			Tidak Ada Bank No Bank
	Bank Umum Pemerintahan Government Bank	Bank Umum Swasta Private Bank	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rural Bank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	13	–	2	273
Merangin	13	1	1	202
Sarolangun	11	2	3	147
Batang Hari	10	1	–	114
Muaro Jambi	13	–	4	141
Tanjung Jabung Timur	8	–	–	85
Tanjung Jabung Barat	11	3	1	122
Tebo	15	2	–	114
Bungo	13	4	1	139
Kota Jambi	25	20	15	32
Kota Sungai Penuh	5	3	2	62
Provinsi Jambi	137	36	29	1.431



Tabel 5.4 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025
Table 5.4 *Number of Villages/Subdistricts with the Availability of Cooperatives by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Koperasi Unit Desa Village Cooperative Unit	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat Cooperative of Small- Scale Industries and Handicrafts	Koperasi Simpan Pinjam Savings and Loan Cooperative	Koperasi Lainnya Other Cooperative
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	5	6	28	8
Merangin	24	3	18	7
Sarolangun	19	1	17	9
Batang Hari	25	4	13	4
Muaro Jambi	38	4	17	18
Tanjung Jabung Timur	2	–	23	15
Tanjung Jabung Barat	31	1	19	10
Tebo	21	1	10	9
Bungo	27	1	14	2
Kota Jambi	–	1	30	38
Kota Sungai Penuh	–	1	8	2
Provinsi Jambi	192	23	197	122

**Tabel**
Table

5.5

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Fasilitas Perkreditan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi, 2025**Number of Villages/Subdistricts with the Availability of Credit Facilities by Regency/ Municipality in Jambi Province, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kredit Usaha Rakyat (KUR) People's Business Credit	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Food and Energy Security Credit	Kredit Usaha Kecil (KUK) Small Business Credit	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Joint Business Group (KUBE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	250	5	18	5
Merangin	190	1	12	10
Sarolangun	118	–	12	11
Batang Hari	110	6	25	10
Muaro Jambi	144	–	19	8
Tanjung Jabung Timur	87	3	11	21
Tanjung Jabung Barat	125	1	21	13
Tebo	129	2	40	11
Bungo	146	3	24	5
Kota Jambi	37	2	13	18
Kota Sungai Penuh	69	–	8	10
Provinsi Jambi	1.405	23	203	122



Tabel 5.6 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Industri Mikro dan Kecil dan Sentra Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025
Table 5.6 *Number of Villages/Subdistricts with the Availability of Micro and Small Industries and Industrial Centers by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Industri Mikro dan Kecil Micro and Small Industries	Sentra Industri Industrial Centres
(1)	(2)	(3)
Kerinci	262	9
Merangin	166	5
Sarolangun	107	7
Batang Hari	107	3
Muaro Jambi	125	3
Tanjung Jabung Timur	81	6
Tanjung Jabung Barat	112	4
Tebo	114	11
Bungo	138	3
Kota Jambi	66	7
Kota Sungai Penuh	69	3
Provinsi Jambi	1.347	61

**Tabel**
Table

5.7

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Produk Barang Unggulan di Provinsi Jambi, 2025**Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and the Availability of Leading Products in Jambi Province, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ada Available	Tidak Ada None	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	46	241	287
Merangin	57	158	215
Sarolangun	26	133	159
Batang Hari	22	102	124
Muaro Jambi	41	114	155
Tanjung Jabung Timur	21	72	93
Tanjung Jabung Barat	40	94	134
Tebo	44	85	129
Bungo	43	110	153
Kota Jambi	18	50	68
Kota Sungai Penuh	11	58	69
Provinsi Jambi	369	1.217	1.586

Keuangan dan Aset Desa

Village Finances and Assets

1.121

Desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Villages have BUMDes

1.402

Desa terdapat Bangunan Milik Desa
Villages have Village's Buildings

314

Desa terdapat Mata Air milik Desa
Villages have Village's Spring

232

Desa memiliki Pasar Desa
Villages have Village's Market





Penjelasan Teknis Keuangan dan Aset Desa

1. Sistem Informasi Desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem Informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
2. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
3. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa yang dicatat di Podes dapat berupa tanah kas desa/ulayat, tambatan perahu, pasar desa, bangunan milik desa, hutan milik desa, mata air milik desa, tempat wisata/pemandian umum, serta aset lainnya milik desa.
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Technical Notes Village Financial and Assets

1. *The Village Information System includes village data, village development data, rural areas, and other information related to village development and rural area development. The Village Information System is managed by the Village Government and can be accessed by the village community and all stakeholders.*
2. *The Village Financial System (SISKEUDES) is an application developed by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in order to improve the quality of village financial management.*
3. *Village assets are items owned by the village that originate from the village's original wealth, are purchased or acquired using the Village Revenue and Expenditure Budget, or are obtained through other legal means. Village assets recorded in Podes can include village treasury land/customary land, boat moorings, village markets, village-owned buildings, village-owned forests, village-owned springs, tourist attractions/public bathing areas, and other village-owned assets.*
4. *Village regulations are laws and regulations established by the village head after discussion and agreement with the Village Consultative Agency.*

**Tabel**
Table

6.1

Banyaknya Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jambi, 2025***Number of Villages by Regency/Municipality and Availability of Village Information System in Jambi Province, 2025***

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Ada, Diperbaharui <i>Available, Update</i>	Ada, Tidak Diperbaharui <i>Available, Not Update</i>	Tidak Ada <i>None</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	143	35	107
Merangin	88	17	100
Sarolangun	1	9	140
Batang Hari	87	2	21
Muaro Jambi	115	24	11
Tanjung Jabung Timur	53	16	4
Tanjung Jabung Barat	92	13	9
Tebo	79	9	34
Bungo	24	15	102
Kota Jambi	–	–	–
Kota Sungai Penuh	29	31	5
Provinsi Jambi	711	171	533



Tabel 6.2 Banyaknya Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sistem Keuangan Desa di Provinsi Jambi, 2025
Table 6.2 *Number of Villages by Regency/Municipality and Village Financial System in Jambi Province, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ada, Diperbaharui Available, Update	Ada, Tidak Diperbaharui Available, Not Update	Tidak Ada None
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	239	34	12
Merangin	193	11	1
Sarolangun	129	17	4
Batang Hari	105	1	4
Muaro Jambi	150	–	–
Tanjung Jabung Timur	73	–	–
Tanjung Jabung Barat	112	1	1
Tebo	122	–	–
Bungo	140	–	1
Kota Jambi	–	–	–
Kota Sungai Penuh	63	2	–
Provinsi Jambi	1.326	66	23



Tabel
Table

6.3

Banyaknya Desa dengan Kepemilikan Badan Usaha dan Aset Desa Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi, 2025

Number of Villages with the Ownership of Enterprise and Village Assets by Regency/ Municipality in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Village-Owned Enterprise (BUMDes)	Tanah Kas Desa/Ulayat Village's Communal Land	Tambatan Perahu Mooring	Pasar Desa Village's Market	Bangunan Milik Desa Village's Building
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	200	226	9	25	274
Merangin	122	197	6	55	205
Sarolangun	125	144	7	22	148
Batang Hari	104	109	18	31	110
Muaro Jambi	142	138	15	14	150
Tanjung Jabung Timur	60	61	41	8	73
Tanjung Jabung Barat	109	75	36	22	114
Tebo	112	113	17	21	122
Bungo	98	139	4	28	141
Kota Jambi	–	–	–	–	–
Kota Sungai Penuh	49	63	–	6	65
Provinsi Jambi	1.121	1.265	153	232	1.402



Lanjutan Tabel
Continued Table 6.3

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Hutan Milik Desa <i>Village's Forest</i>	Mata Air Milik Desa <i>Village's Springs</i>	Tempat Wisata/ Pemandian Umum <i>Tourist Place/Public Bath</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kerinci	48	137	58	279
Merangin	49	80	42	203
Sarolangun	32	31	19	139
Batang Hari	5	12	4	105
Muaro Jambi	7	14	19	149
Tanjung Jabung Timur	7	1	1	73
Tanjung Jabung Barat	2	2	13	106
Tebo	–	3	5	119
Bungo	15	25	26	141
Kota Jambi	–	–	–	–
Kota Sungai Penuh	–	9	2	65
Provinsi Jambi	165	314	189	1.379

**Tabel**
Table

6.4

Banyaknya Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Peraturan Desa 2024 di Provinsi Jambi***Number of Villages by Regency/Municipality and Availability of Village Regulation for 2024 in Jambi Province***

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ada Available	Tidak Ada None	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	285	–	285
Merangin	205	–	205
Sarolangun	145	5	150
Batang Hari	110	–	110
Muaro Jambi	150	–	150
Tanjung Jabung Timur	73	–	73
Tanjung Jabung Barat	114	–	114
Tebo	118	4	122
Bungo	141	–	141
Kota Jambi	–	–	–
Kota Sungai Penuh	65	–	65
Provinsi Jambi	1.406	9	1.415

Keterangan Pemerintah Desa/Kelurahan

Village/Subdistrict Government Information

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kelamin Kepala Desa/Lurah

Number of Villages/Subdistricts by Sex of
Village/Subdistrict Head



Laki-Laki
Male

1.452

desa/kelurahan
villages/subvillages



Perempuan
Female

65

desa/kelurahan
villages/subvillages

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Kepala Desa/Lurah

Number of Villages/Subdistricts by Education
Attainment of Village/Subdistrict Head

Kurang dari SD
Below Elementary
School

0

desa/kelurahan
villages/subvillages



SD-SMP
Elementary -
Junior High School

28

desa/kelurahan
villages/subvillages



SMA
Senior High
School

886

desa/kelurahan
villages/subvillages



Perguruan Tinggi
Higher
Education

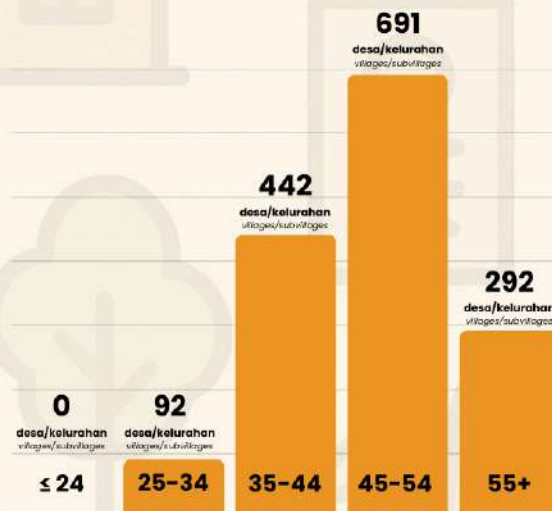
603

desa/kelurahan
villages/subvillages



Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kelompok Umur Kepala Desa/Lurah

Number of Villages/Subdistricts by Age Group of
Village/Subdistrict Head





Penjelasan Teknis Keterangan Pemerintah Desa/Kelurahan

1. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa/kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan. Perangkat desa/kelurahan terdiri dari sekretariat desa/kelurahan, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
2. Kepala Desa/Lurah adalah pejabat pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa/kelurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Sekretaris Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa/kelurahan. Sekretaris desa/kelurahan bertugas membantu kepala desa/lurah dalam bidang administrasi pemerintahan.
4. Sekretariat Desa/Kelurahan dipimpin oleh sekretaris desa/kelurahan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa/lurah dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat desa/kelurahan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit

Technical Notes Village/Subdistrict Government Information

1. *The Village/Subdistrict Government refers to the head of village/subdistrict, or any other equivalent designation, assisted by village/subdistrict officials who administer village/subdistrict governance. The village/subdistrict officials include the village/subdistrict secretariat, regional officers, and technical officers.*
2. *Head of Village/Subdistrict is a village/subdistrict government official who have the authority, duties and obligations to organize and manage their village households and carry out duties from the central and regional governments.*
3. *The Village/Subdistrict Secretary serves as the head of the village/subdistrict secretariat. The village/subdistrict secretary is responsible for assisting the head of village/subdistrict in government administration.*
4. *Village/Subdistrict Secretariat is led by village/subdistrict secretary and assisted by secretarial staff in assisting the head of village/subdistrict in public administration. The village/subdistrict secretariat consists of maximum 3 (three) divisions: administration and general affairs, financial affairs, and planning, and minimum 2 (two) divisions: general affairs and planning,*



2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.

5. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa/lurah sebagai satuan tugas kewilayahan.
6. Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu kepala desa/lurah sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit dua seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

and financial affairs.

5. *Regional Officers serve as supporting elements to the head of village/ subdistrict and act as territorial task units.*
6. *Technical Officers serve as supporting elements to the head of village/ subdistrict and act as operational task unit. The technical officers consist of maximum three sections: the government section, the welfare section, and the public services section; or minimum two sections : the government section and the combined welfare and public services section.*



Tabel
Table

7.1

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025
Number of Villages/Subdistricts with the Existence of the Village/Subdistrict Government by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kepala Desa/Lurah Head of Village/ Subdistrict	Sekretaris Desa/Kelurahan Secretary of Village/Subdistrict	Pelaksana Kewilayahan Regional Officers	Pelaksana Teknis Technical Officers
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	282	283	284	286
Merangin	200	213	212	215
Sarolangun	151	159	151	157
Batang Hari	121	120	104	124
Muaro Jambi	155	155	150	155
Tanjung Jabung Timur	93	84	79	85
Tanjung Jabung Barat	128	123	126	133
Tebo	106	127	125	128
Bungo	148	151	142	153
Kota Jambi	68	67	–	68
Kota Sungai Penuh	65	68	69	69
Provinsi Jambi	1.517	1.550	1.442	1.573

**Tabel**
Table 7.2

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah dan/atau Sekretaris Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi, 2025
Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Head and Village/Subdistrict Secretary by Regency/Municipality and Sex in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kepala Desa/Lurah Head of Village/Subdistrict			Sekretaris Desa/Kelurahan Secretary of Village/Subdistrict		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	276	6	282	269	14	283
Merangin	193	7	200	193	20	213
Sarolangun	148	3	151	147	12	159
Batang Hari	115	6	121	102	18	120
Muaro Jambi	143	12	155	135	20	155
Tanjung Jabung Timur	90	3	93	77	7	84
Tanjung Jabung Barat	120	8	128	111	12	123
Tebo	104	2	106	118	9	127
Bungo	145	3	148	138	13	151
Kota Jambi	54	14	68	24	43	67
Kota Sungai Penuh	64	1	65	50	18	68
Provinsi Jambi	1.452	65	1.517	1.364	186	1.550



Tabel 7.3 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Jambi, 2025
Table *Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Head by Regency/Municipality and Age Group in Jambi Province, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	≤ 24	25–34	35–44	45–54	55+	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	–	12	76	132	62	282
Merangin	–	15	61	99	25	200
Sarolangun	–	8	54	59	30	151
Batang Hari	–	10	32	54	25	121
Muaro Jambi	–	7	50	65	33	155
Tanjung Jabung Timur	–	7	30	47	9	93
Tanjung Jabung Barat	–	8	40	58	22	128
Tebo	–	5	37	42	22	106
Bungo	–	8	40	65	35	148
Kota Jambi	–	10	13	37	8	68
Kota Sungai Penuh	–	2	9	33	21	65
Provinsi Jambi	–	92	442	691	292	1.517

**Tabel**
Table 7.4**Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Sekretaris Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Jambi, 2025****Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Secretary by Regency/Municipality and Age Group in Jambi Province, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	≤ 24	25–34	35–44	45–54	55+	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	2	101	134	40	6	283
Merangin	2	76	95	33	7	213
Sarolangun	2	41	79	32	5	159
Batang Hari	1	42	54	20	3	120
Muaro Jambi	1	50	77	23	4	155
Tanjung Jabung Timur	–	25	40	17	2	84
Tanjung Jabung Barat	–	31	56	35	1	123
Tebo	–	33	60	25	9	127
Bungo	1	44	65	34	7	151
Kota Jambi	–	7	14	35	11	67
Kota Sungai Penuh	1	29	31	5	2	68
Provinsi Jambi	10	479	705	299	57	1.550



Tabel 7.5 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jambi, 2025
Table 7.5 *Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Head by Regency/Municipality and Education Attainment in Jambi Province, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tidak Pernah Sekolah Never Attending School	Tidak Tamat SD Not Completed Elementary School	SD dan Sederajat Elementary School	SMP dan Sederajat Junior High School	SMU dan Sederajat Senior High School
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	–	–	–	3	171
Merangin	–	–	–	3	126
Sarolangun	–	–	–	1	97
Batang Hari	–	–	–	2	64
Muaro Jambi	–	–	–	1	88
Tanjung Jabung Timur	–	–	–	1	46
Tanjung Jabung Barat	–	–	–	5	77
Tebo	–	–	–	4	69
Bungo	–	–	–	8	103
Kota Jambi	–	–	–	–	–
Kota Sungai Penuh	–	–	–	–	45
Provinsi Jambi	–	–	–	28	886



Lanjutan Tabel
Continued Table 7.5

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Akademi/DIII <i>Academy/ Associate's Degree</i>	Diploma IV/S1 <i>Bachelor Degree/ Undergraduate</i>	S2 <i>Graduate</i>	S3 <i>Post Graduate</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kerinci	23	69	16	–	282
Merangin	4	63	4	–	200
Sarolangun	8	42	3	–	151
Batang Hari	5	48	2	–	121
Muaro Jambi	5	59	2	–	155
Tanjung Jabung Timur	4	40	2	–	93
Tanjung Jabung Barat	2	41	3	–	128
Tebo	6	25	2	–	106
Bungo	3	32	2	–	148
Kota Jambi	2	53	13	–	68
Kota Sungai Penuh	5	13	2	–	65
Provinsi Jambi	67	485	51	–	1.517



Tabel 7.6 Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Sekretaris Desa/Lurah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jambi, 2025
Number of Villages/Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Secretary by Regency/Municipality and Education Attainment in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tidak Pernah Sekolah Never Attending School	Tidak Tamat SD Not Completed Elementary School	SD dan Sederajat Elementary School	SMP dan Sederajat Junior High School	SMU dan Sederajat Senior High School
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	–	–	–	–	74
Merangin	–	–	–	–	72
Sarolangun	–	–	–	–	86
Batang Hari	–	–	–	–	41
Muaro Jambi	–	–	–	–	59
Tanjung Jabung Timur	–	–	–	1	29
Tanjung Jabung Barat	–	–	–	–	53
Tebo	–	–	–	–	54
Bungo	–	–	–	–	57
Kota Jambi	–	–	–	–	2
Kota Sungai Penuh	–	–	–	–	16
Provinsi Jambi	–	–	–	1	543



Lanjutan Tabel
Continued Table 7.6

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Akademi/DIII Academy/ Associate's Degree	Diploma IV/S1 Bachelor Degree/ Undergraduate	S2 Graduate	S3 Post Graduate	Jumlah Total
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kerinci	29	163	17	–	283
Merangin	9	128	4	–	213
Sarolangun	6	64	3	–	159
Batang Hari	6	72	1	–	120
Muaro Jambi	5	90	1	–	155
Tanjung Jabung Timur	3	50	1	–	84
Tanjung Jabung Barat	4	64	2	–	123
Tebo	11	61	1	–	127
Bungo	5	87	2	–	151
Kota Jambi	4	53	8	–	67
Kota Sungai Penuh	9	41	2	–	68
Provinsi Jambi	91	873	42	–	1.550

Bencana Alam dan Gangguan Keamanan

Natural Disasters and Security Disturbances



Banjir/Flood

39,79%

desa/kelurahan mengalami banjir villages/subdistricts experience flooding



Angin puyuh/Typhon

1,26%

desa/kelurahan mengalami angin puyuh villages/subdistricts experience typhon



43,38%

Desa/kelurahan mengalami bencana alam Villages/subdistricts experience natural disaster

Tanah longsor/Landslide

5,55%

desa/kelurahan mengalami tanah longsor villages/subdistricts experience landslide



Kebakaran hutan dan lahan Forest and land fires

1,13%

desa/kelurahan mengalami kebakaran hutan dan lahan villages/subdistricts experience forest and land fires

*Periode bencana alam adalah pada 2024 hingga Mei 2025/The natural disaster period is from 2024 to May 2025



Penjelasan Teknis Bencana Alam dan Gangguan Keamanan

1. Bencana Alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa bencana yang terjadi dalam kurun waktu Januari 2024 hingga Mei 2025. Dalam suatu kejadian bencana alam dapat menimbulkan beberapa peristiwa alam lainnya seperti tanah longsor, banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang laut, angin puyuh/puting beliung/topan, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan abrasi, sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi.
2. Sistem Peringatan Dini Bencana Alam adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana alam pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sistem peringatan dini bencana alam yang dimaksud, misalnya peringatan dini terhadap warga mengenai status ketinggian pintu air, status gunung, dan sebagainya, yang disampaikan melalui kentongan, pemberitahuan dengan *loud speaker*, dan lainnya.
3. Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi: Sungai, Kanal, Tanggul, dll, adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21

Technical Notes Natural Disaster and Security Disturbance

1. *Natural Disaster is an event or series of disaster events that occurred in the period from January 2024 to May 2025 that threaten and disrupt the lives and livelihoods caused by natural factors such as: landslides, floods, flash floods, earth-quake, tsunami, tide, typhoons/cyclone, volcanic eruptions, forest and land fires, drought, and abrasion, so it can lead to result in loss of material and non-material.*
2. *Natural Disaster Early Warning System is a series of activities warnings about the possibility of a natural disaster to local community by regulatory authorities. The natural disaster early warning system referred here is early warning to residents regarding the status of sluice height, mountain status, etc., which is conveyed through kentongan, notification with loud speakers, and others.*
3. *Construction, Maintenance or Normalization: Rivers, Canals, Embankments, etc, are activities that are examples of what can be done as disaster prevention efforts. According to Government Regulation Number 21 of 2008 concerning Implementation*



Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

4. Sistem Peringatan Dini Tsunami adalah fasilitas pendeteksian kejadian bencana alam tsunami untuk memberikan peringatan dini sebelum bencana alam tsunami datang/menimpa desa/kelurahan. Sistem ini menggunakan peralatan teknologi tinggi sebagai alat atau sarana untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam tsunami itu akan terjadi. Cakupan wilayah sistem peringatan dini tsunami meliputi semua desa/kelurahan yang dapat dijangkau oleh sistem tersebut dan bukan hanya desa/kelurahan dimana lokasi alat tersebut berada.
5. Perlengkapan Keselamatan adalah perlengkapan yang diupayakan/disediakan oleh aparat setempat maupun warga desa untukantisipasi maupun evakuasi korban saat terjadi bencana alam, seperti: perahu karet, tenda, persediaan masker, dan sebagainya.
6. Rambu-rambu dan Jalur Evakuasi adalah rambu-rambu/tanda dan jalur atau rute khusus yang digunakan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam. Rambu-rambu dan jalur atau rute ini bisa tersedia di desa/kelurahan dalam bentuk apapun, misal peta,

of Disaster Management, prevention is carried out by reducing the threat of disasters and the vulnerability of those threatened by disaster.

4. *Tsunami Early Warning System is a facility of early detection of tsunami occurrence to provide early warning for the population before the tsunami hit the village/subdistrict. This system uses high technology equipment as a tool to monitor when and where the tsunami will occur. The coverage area of the tsunami early warning system covers all villages/subdistricts that can be reached by the system and not just the village/subdistrict where the location of the equipment is located.*
5. *Safety Equipment is equipment that sought/provided by local apparatus or village community to anticipate the occurrence of natural disasters, such as providing rubber boats, tents, masks stock, etc.*
6. *Evacuation Route is a path or a special route that is used for evacuation when a natural disaster is occurred. These routes could be available in the village in any form, e.g. maps, evacuation instructions, and muster point. The most important thing is that in case of a natural disaster,*



petunjuk evakuasi, dan lokasi aman untuk berkumpul (*muster point*). Hal yang terpenting adalah jika sewaktu waktu terjadi bencana alam, warga desa/kelurahan tahu jalur atau rute evakuasi yang harus dilewati.

the villagers have clear evacuation route that must be followed.

7. Pupuk Kimia atau Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk (Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011).
 8. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman (Undang-Undang No.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman).
 9. Cuaca Ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta (Peraturan BMKG No. 9 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem).
 10. Penggundulan Hutan untuk Permukiman, Kebun, Tambang, dan Lainnya adalah kegiatan penebangan atau alih fungsi hutan menjadi permukiman,
7. *Chemical or Inorganic Fertilizers are fertilizers produced through chemical, physical, and/or biological engineering processes and are manufactured by the fertilizer industry or factories (Minister of Agriculture Regulation No. 43/Permentan/SR.140/8/2011).*
 8. *Pesticides are chemical substances or compounds, growth regulators and stimulants, other materials, and microorganisms or viruses used to protect plants (Law No. 12 of 1992 concerning Plant Cultivation Systems).*
 9. *Extreme Weather is a natural phenomenon characterized by rainfall, wind direction and speed, air temperature, humidity, and visibility that can result in losses, especially to life and property (BMKG Regulation No. 9 of 2022 concerning the Provision and Dissemination of Early Warnings for Extreme Weather).*
 10. *Deforestation for Settlement, Plantations, Mining, and Other Purposes is the clearing or conversion of forests into settlements, plantations,*



kebun, atau lahan tambang yang menyebabkan berkurangnya daya serap karbon dan meningkatnya emisi gas rumah kaca.

11. Penggunaan Pupuk Kimia dan Pestisida adalah penggunaan bahan kimia sintetis dalam kegiatan pertanian yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca serta menimbulkan pencemaran tanah dan air.

12. Pembakaran atau Pembuangan Sampah di Tempat Ilegal adalah praktik membakar atau membuang sampah di lokasi tidak resmi yang menimbulkan emisi karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄) serta mencemari lingkungan sekitar.

13. Peningkatan Jumlah Pabrik dan Industri adalah pertambahan fasilitas industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca melalui proses produksi dan pembakaran bahan bakar fosil.

14. Peningkatan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi gas buang penyumbang utama pemanasan global dan pencemaran udara.

15. Kelangkaan Air akibat Kemarau Panjang adalah kondisi berkurangnya ketersediaan air bersih di desa/kelurahan akibat kemarau panjang dan perubahan pola hujan yang tidak menentu.

or mining sites, resulting in reduced carbon sequestration and increased greenhouse gas emissions.

11. Use of Chemical Fertilisers and Pesticides is the use of synthetic chemicals in agricultural activities that can produce greenhouse gas emissions and cause soil and water pollution.

12. Burning or Disposal of Waste in Illegal Locations is the practice of burning or disposing of waste in unauthorised locations, which causes emissions of carbon dioxide (CO₂) and methane (CH₄) and pollutes the surrounding environment.

13. Increase in the Number of Factories and Industries is the addition of industrial facilities that produce greenhouse gas emissions through production processes and the burning of fossil fuels.

14. Increase in the Ownership of Four-Wheel or More Motor Vehicles is the increase in the number of motor vehicles that produce exhaust emissions, which are a major contributor to global warming and air pollution.

15. Water scarcity due to prolonged drought is a condition in which the availability of clean water in villages/subdistricts is reduced due to prolonged drought and unpredictable rainfall patterns.



16. Kesulitan Bertani atau Melaut adalah situasi ketika aktivitas pertanian atau perikanan terganggu akibat kekeringan, serangan hama, perubahan musim, atau cuaca laut yang ekstrem.
17. Kehilangan Mata Pencaharian yang Bergantung pada Alam adalah kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan yang bergantung pada sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, atau pariwisata alam, akibat dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, atau bencana lainnya.
18. Gangguan Kesehatan akibat Perubahan Iklim adalah kasus penyakit seperti pneumonia, malaria, atau DBD yang meningkat di desa/kelurahan dalam 5 tahun terakhir akibat perubahan iklim.
19. Kerusakan Rumah/Harta Benda akibat Bencana Terkait Iklim adalah kerusakan fisik pada rumah dan barang milik warga akibat bencana terkait iklim seperti banjir, longsor, puting beliung, kekeringan, atau kebakaran hutan.
20. Gagal Panen, Rusaknya Tanaman, atau Kematian Ternak Akibat Bencana Terkait Iklim adalah kondisi di mana hasil pertanian atau peternakan menurun drastis atau hilang akibat cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, atau perubahan suhu yang tidak menentu.
16. *Difficulties in Farming or Fishing are situations where agricultural or fishing activities are disrupted due to drought, pest infestations, seasonal changes, or extreme sea conditions.*
17. *Loss of Nature-Dependent Livelihoods refers to the loss of jobs or sources of income that depend on natural resources, such as agriculture, fisheries, forestry, plantations, mining, or nature-based tourism, due to the impacts of climate change, such as floods, droughts, forest fires, or other disasters.*
18. *Health Problems due to Climate Change are cases of diseases such as pneumonia, malaria, or dengue fever that have increased in villages/subdistricts in the last 5 years due to climate change.*
19. *Damage to Houses/Property due to Climate-Related Disasters is physical damage to residents' houses and property due to climate-related disasters such as floods, landslides, tornadoes, droughts, or forest fires.*
20. *Crop Failure, Crop Damage, or Livestock Deaths due to Climate-Related Disasters are conditions in which agricultural or livestock yields decline drastically or are lost due to extreme weather, drought, floods, or erratic temperature changes.*



21. Perkelahian Massal adalah perkelahian yang terjadi secara massal melibatkan banyak pelaku atau melibatkan minimal dua orang setiap kelompoknya. Perkelahian massal biasanya melibatkan: antar kelompok masyarakat, antar pelajar, antar suku, atau lainnya yang terjadi di desa selama setahun terakhir.
22. Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal adalah orang atau sekelompok orang yang berinisiatif secara aktif untuk mendamaikan massa yang sedang bertikai.
23. Aparat Keamanan meliputi aparat kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Pengamanan (Satpam), dan sebagainya.
24. Aparat Pemerintah meliputi aparatur pemerintah daerah, kecamatan, desa dan sebagainya.
25. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang memiliki pengaruh atau wibawa di lingkungannya. Contoh: Ketua RT/RW, Ketua Adat, pengurus ormas, dan sebagainya.
26. Tokoh Agama adalah orang yang memiliki kharisma dalam agama dan menjadi panutan orang-orang sekitar. Contoh: ulama/ustadz, pendeta, dan sebagainya
21. *A Mass Brawl is a fight that occurs on a large scale, involving many people or at least two people per group. Mass brawls typically involve: intergroup violence, students, interethnic groups, or other incidents that have occurred in a village over the past year.*
22. *The Initiator of the Resolution of Mass brawl is a person or group of people who actively takes the initiative to reconcile the masses who are fighting.*
23. *Security Forces include the police, military (TNI), Civil Service Police Unit (Satpol PP), Security Unit (Satpam), and so on.*
24. *Government Official includes the local government officials, subdistrict, village, and so on.*
25. *Community Figure is someone who has influence or authority in their communities. For example: Head of RT/RW, traditional leader or community organization leader (Organisasi Masyarakat), and so on.*
26. *Religious Leader is someone who have charisma in their religion and serves as a role model for those around them. For example: ustadz, pastor, and so on.*



Tabel 8.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam di Provinsi Jambi, 2025
Table 8.1 *Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and the Type of Effort in Anticipation/Mitigation of Natural Disaster in Jambi Province, 2025*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam <i>Natural Disaster Early Warning System</i>	Sistem Peringatan Dini Tsunami <i>Tsunami Early Warning System</i>	Perlengkapan Keselamatan <i>Safety Equipment</i>	Rambu-Rambu dan Jalur Evakuasi <i>Signs and Evacuation Route</i>	Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi: Sungai, Kanal, Tanggul, dll <i>Construction, Maintenance, or Normalization: Rivers, Canals, Embankment, etc</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	39	–	28	7	128
Merangin	10	–	20	4	75
Sarolangun	2	–	2	5	61
Batang Hari	5	–	12	3	14
Muaro Jambi	15	–	18	2	34
Tanjung Jabung Timur	14	–	14	5	50
Tanjung Jabung Barat	2	–	19	2	62
Tebo	1	–	10	3	12
Bungo	2	–	21	1	122
Kota Jambi	–	–	2	1	24
Kota Sungai Penuh	3	–	19	20	44
Provinsi Jambi	93	–	165	53	626

**Tabel**
Table

8.2

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bencana Alam di Provinsi Jambi, 2025¹***Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Natural Disaster in Jambi Province, 2025¹***

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Tanah Longsor <i>Landslide</i>	Banjir Flood	Banjir Bandang <i>Flash Flood</i>	Gempa Bumi <i>Earth-quake</i>	Tsunami <i>Tsunami</i>	Gelombang Pasang Laut <i>Tide</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	33	102	13	–	–	–
Merangin	24	43	–	–	–	–
Sarolangun	4	76	–	–	–	–
Batang Hari	–	81	–	–	–	–
Muaro Jambi	–	77	–	–	–	–
Tanjung Jabung Timur	–	18	–	–	–	5
Tanjung Jabung Barat	4	25	–	–	–	–
Tebo	–	54	–	–	–	–
Bungo	11	74	–	–	–	–
Kota Jambi	–	34	–	–	–	–
Kota Sungai Penuh	12	47	6	–	–	–
Provinsi Jambi	88	631	19	–	–	5



Lanjutan Tabel
Continued Table 8.2

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Angin Puyuh/ Puting Beliung/Topan <i>Typhoon Cyclone</i>	Gunung Meletus Volcanic Eruption	Kebakaran Hutan dan Lahan Forest and Land Fires	Kekeringan Drought	Abrasi Abration	Tidak Ada Bencana Alam No Natural Disaster
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kerinci	2	–	1	1	–	167
Merangin	2	–	–	–	–	151
Sarolangun	1	–	–	–	–	81
Batang Hari	2	–	–	2	–	42
Muaro Jambi	2	–	4	4	–	76
Tanjung Jabung Timur	–	–	1	–	–	72
Tanjung Jabung Barat	3	–	3	–	–	106
Tebo	–	–	1	–	–	74
Bungo	–	–	4	–	–	78
Kota Jambi	–	–	–	–	–	34
Kota Sungai Penuh	8	–	4	2	–	17
Provinsi Jambi	20	–	18	9	–	898

Catatan: ¹ Data mencerminkan kondisi pada Januari 2024–Mei 2025

Note: ¹ The data reflects conditions in January 2024–May 2025

**Tabel**
Table 8.3

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Aktivitas yang Berpotensi Meningkatkan Emisi Gas Rumah Kaca Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025¹
Number of Villages/Subdistricts with Activities that Have the Potential to Increase Greenhouse Gas Emissions by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025¹

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Penggundulan Hutan untuk Permukiman, Kebun, Tambang, dll <i>Deforestation for Settlements, Plantations, Mines, etc.</i>	Peningkatan Penggunaan Pupuk Kimia dan Pestisida <i>Increased Use of Chemical Fertilisers and Pesticides</i>	Peningkatan Pembakaran dan Pembuangan Sampah di Tempat Ilegal <i>Increased Burning and Disposal of Waste in Illegal Dumpsites</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	8	200	135
Merangin	16	140	39
Sarolangun	10	67	50
Batang Hari	–	71	21
Muaro Jambi	–	62	58
Tanjung Jabung Timur	1	45	2
Tanjung Jabung Barat	3	70	7
Tebo	3	96	39
Bungo	4	125	51
Kota Jambi	–	3	6
Kota Sungai Penuh	2	29	16
Provinsi Jambi	47	908	424



Lanjutan Tabel
Continued Table 8.3

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Peningkatan Jumlah Pabrik dan Industri Increase in the Number of Factories and Industries	Peningkatan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Increase in Ownership of Motor Vehicles with Four or More Wheels
(1)	(5)	(6)
Kerinci	11	215
Merangin	2	125
Sarolangun	3	105
Batang Hari	3	95
Muaro Jambi	4	103
Tanjung Jabung Timur	2	73
Tanjung Jabung Barat	1	99
Tebo	4	100
Bungo	7	129
Kota Jambi	7	36
Kota Sungai Penuh	4	38
Provinsi Jambi	48	1.118

Catatan: ¹ Data mencerminkan kondisi selama lima tahun terakhir sebelum kegiatan Podes 2025

Note: ¹ The data reflects conditions over the five years prior to the Podes 2025 activity

**Tabel**
Table 8.4

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Keberadaan Kejadian yang Dirasakan Penduduk Akibat Perubahan Iklim Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025¹
Number of Villages/Subdistricts with Events Perceived by Residents as Resulting from Climate Change by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025¹

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kelangkaan Air Akibat Kemarau Panjang <i>Water Scarcity due to Prolonged Drought</i>	Kesulitan Bertani/Melaut (Hama, Kemarau, Cuaca Ekstrem) <i>Difficulty in Farming/Fishing (Pests, Drought, Extreme Weather)</i>	Kehilangan Mata Pencarian yang Bergantung pada Alam <i>Loss of Livelihoods Dependent on Nature</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	49	64	14
Merangin	28	27	5
Sarolangun	39	50	23
Batang Hari	44	45	22
Muaro Jambi	71	47	33
Tanjung Jabung Timur	6	19	5
Tanjung Jabung Barat	33	30	9
Tebo	28	28	10
Bungo	43	46	35
Kota Jambi	11	11	4
Kota Sungai Penuh	24	32	20
Provinsi Jambi	376	399	180



Lanjutan Tabel
Continued Table 8.4

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Gangguan Kesehatan (Pneumonia, Malaria, DBD) Health Problems (Pneumonia, Malaria, Dengue)	Kerusakan Rumah/Harta Benda Akibat Bencana Terkait Iklim Damage to Houses/Property due to Climate-Related Disasters	Gagal Panen, Rusaknya Tanaman, atau Kematian Ternak Akibat Bencana Terkait Iklim Crop Failure or Livestock Death due to Climate-Related Disasters
(1)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	104	40	64
Merangin	50	13	23
Sarolangun	37	18	41
Batang Hari	46	16	47
Muaro Jambi	57	17	39
Tanjung Jabung Timur	14	6	8
Tanjung Jabung Barat	35	8	10
Tebo	13	4	27
Bungo	66	34	40
Kota Jambi	23	7	11
Kota Sungai Penuh	31	36	35
Provinsi Jambi	476	199	345

Catatan: ¹ Data mencerminkan kondisi selama lima tahun terakhir sebelum kegiatan Podes 2025

Note: ¹ The data reflects conditions over the five years prior to the Podes 2025 activity

**Tabel**
Table

8.5

Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Kejadian Perkelahian Massal di Provinsi Jambi, 2025***Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and the Occurrence of Mass Fight in Jambi Province, 2025***

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ada Available	Tidak Ada None	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	3	284	287
Merangin	1	214	215
Sarolangun	2	157	159
Batang Hari	–	124	124
Muaro Jambi	–	155	155
Tanjung Jabung Timur	–	93	93
Tanjung Jabung Barat	1	133	134
Tebo	1	128	129
Bungo	8	145	153
Kota Jambi	7	61	68
Kota Sungai Penuh	–	69	69
Provinsi Jambi	23	1.563	1.586



Tabel
Table

8.6

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Korban Meninggal dan Luka-Luka di Provinsi Jambi, 2025
Number of Villages/Subdistricts with Incidents of Mass Fight by Regency/Municipality and the Presence of Fatalities and Injuries in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Meninggal Fatalities			Luka-Luka Injuries		
	Ada Available	Tidak Ada None	Jumlah Total	Ada Available	Tidak Ada None	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	1	2	3	–	3	3
Merangin	1	–	1	–	1	1
Sarolangun	–	2	2	–	2	2
Batang Hari	–	–	–	–	–	–
Muaro Jambi	–	–	–	–	–	–
Tanjung Jabung Timur	–	–	–	–	–	–
Tanjung Jabung Barat	–	1	1	1	–	1
Tebo	1	–	1	1	–	1
Bungo	–	8	8	6	2	8
Kota Jambi	1	6	7	4	3	7
Kota Sungai Penuh	–	–	–	–	–	–
Provinsi Jambi	4	19	23	12	11	23

**Tabel**
Table

8.7

Banyaknya Desa/Kelurahan dengan Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota dan Inisiator Penyelesaiannya di Provinsi Jambi, 2025***Number of Villages/Subdistricts with Incidents of Mass Fight by Regency/Municipality and Initiator of the Resolution in Jambi Province, 2025***

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Aparat Keamanan <i>Security Forces</i>	Aparat Pemerintah <i>Government Official</i>	Tokoh Masyarakat <i>Community Figure</i>	Tokoh Agama <i>Religious Figure</i>	Lainnya <i>Others</i>	Tidak Ada Inisiator <i>No Initiator</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	2	2	1	–	–	–
Merangin	1	1	1	1	–	–
Sarolangun	–	2	2	2	–	–
Batang Hari	–	–	–	–	–	–
Muaro Jambi	–	–	–	–	–	–
Tanjung Jabung Timur	–	–	–	–	–	–
Tanjung Jabung Barat	1	–	–	–	–	–
Tebo	1	1	1	–	–	–
Bungo	6	7	7	4	1	–
Kota Jambi	6	3	1	–	–	–
Kota Sungai Penuh	–	–	–	–	–	–
Provinsi Jambi	17	16	13	7	1	–



Tabel 8.8 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan di Provinsi Jambi, 2025
Table 8.8 *Number of Villages/Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Citizen's Effort to Secure Community in Jambi Province, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pembangunan/ Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan Building/ Maintenance Security Post	Pembentukan/ Pengaturan Regu Keamanan Establishing Security Guard	Penambahan Jumlah Anggota Hansip/Linmas Raising Civil Defense/Civil Protection Personnel	Pelaporan Tamu Menginap Lebih dari 24 Jam Reporting Guests Staying More Than 24 Hours	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga Activation of Security System from Citizen Initiative
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	141	84	36	216	135
Merangin	124	117	31	175	141
Sarolangun	71	54	13	98	77
Batang Hari	63	64	16	115	83
Muaro Jambi	95	77	8	142	111
Tanjung Jabung Timur	71	56	6	91	72
Tanjung Jabung Barat	92	77	16	119	96
Tebo	96	104	20	129	124
Bungo	69	61	18	129	99
Kota Jambi	57	40	1	68	51
Kota Sungai Penuh	25	43	6	62	37
Provinsi Jambi	904	777	171	1.344	1.026

Infrastruktur Pendidikan

Educational Infrastructure

JUMLAH SEKOLAH MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NUMBER OF SCHOOLS BY EDUCATIONAL LEVEL

SD/MI

Elementary Schools

2.347

Negeri
Public

519

Swasta
Private

SMP/MTs

Junior High Schools

627

Negeri
Public

534

Swasta
Private

SMA/MA

Senior High Schools

194

Negeri
Public

327

Swasta
Private

SMK

Vocational Schools

108

Negeri
Public

79

Swasta
Private

**AKADEMI/PERGURUAN
TINGGI**
Academy/University

5

Negeri
Public

48

Swasta
Private



Penjelasan Teknis Infrastruktur Pendidikan

1. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui/disahkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah.
2. Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
3. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
4. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
5. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang

Technical Notes Education Infrastructure

1. *Educational institutions are institutions that produce students who graduate and are recognized/approved by the Ministry of Primary and Secondary Education and the Ministry of Higher Education, Science, and Technology, as evidenced by certificates/diplomas.*
2. *The Formal Education Level consists of primary education, secondary education, and high education. The kind of education that taught consists of general education, vocational, academic, professional, religious, and specific education.*
3. *The Primary Education consists of Elementary School and Islamic Elementary School or other equivalent forms and Junior High School and Madrasah Tsanawiyah, or other equivalent forms.*
4. *The Secondary Education consists of the senior high school, Madrasah Aliyah, Vocational School, and Vocational Madrasah Aliyah, or other equivalent forms.*
5. *The High Education consists of the education level after the secondary education that consists of diplomas, bachelor, master, specialist, and doctoral degrees that are held by the college. The*



diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

colleges can be academy, polytechnic, high school, institute, or university.

<https://jambi.bps.go.id>



Tabel 9.1 Banyaknya SD/MI Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025
Table 9.1 *Number of Public and Private Elementary Schools by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	SD Elementary School			MI Madrasah Ibtidaiyah			SD/MI Elementary School/Madrasah Ibtidaiyah		
	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kerinci	227	4	231	5	34	39	232	38	270
Merangin	313	15	328	5	23	28	318	38	356
Sarolangun	227	22	249	5	31	36	232	53	285
Batang Hari	205	15	220	4	12	16	209	27	236
Muaro Jambi	244	18	262	5	37	42	249	55	304
Tanjung Jabung Timur	194	7	201	2	26	28	196	33	229
Tanjung Jabung Barat	201	15	216	4	44	48	205	59	264
Tebo	237	16	253	5	52	57	242	68	310
Bungo	227	16	243	4	22	26	231	38	269
Kota Jambi	163	47	210	1	47	48	164	94	258
Kota Sungai Penuh	69	5	74	–	11	11	69	16	85
Provinsi Jambi	2.307	180	2.487	40	339	379	2.347	519	2.866



Tabel 9.2 Banyaknya SMP/MTs Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025
Table 9.2 *Number of Public and Private Junior High Schools by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/ Municipality	SMP Junior High School			MTs Madrasah Tsanawiyah			SMP/MTs Junior High School/Madrasah Tsanawiyah		
	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kerinci	53	1	54	7	17	24	60	18	78
Merangin	80	13	93	7	40	47	87	53	140
Sarolangun	56	25	81	7	45	52	63	70	133
Batang Hari	46	15	61	8	23	31	54	38	92
Muaro Jambi	68	19	87	8	41	49	76	60	136
Tanjung Jabung Timur	45	6	51	4	29	33	49	35	84
Tanjung Jabung Barat	58	10	68	3	52	55	61	62	123
Tebo	62	13	75	6	60	66	68	73	141
Bungo	55	9	64	8	35	43	63	44	107
Kota Jambi	25	45	70	6	32	38	31	77	108
Kota Sungai Penuh	13	2	15	2	2	4	15	4	19
Provinsi Jambi	561	158	719	66	376	442	627	534	1.161



Tabel 9.3 Banyaknya SMA/MA Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025
Table 9.3 Number of Public and Private Senior High Schools by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	SMA Senior High School			MA Madrasah Aliyah			SMA/MA Senior High School/Madrasah Aliyah		
	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kerinci	14	–	14	3	9	12	17	9	26
Merangin	20	6	26	3	26	29	23	32	55
Sarolangun	14	13	27	2	21	23	16	34	50
Batang Hari	11	7	18	5	20	25	16	27	43
Muaro Jambi	18	10	28	4	22	26	22	32	54
Tanjung Jabung Timur	10	4	14	2	25	27	12	29	41
Tanjung Jabung Barat	18	12	30	2	32	34	20	44	64
Tebo	20	3	23	2	40	42	22	43	65
Bungo	19	2	21	3	22	25	22	24	46
Kota Jambi	14	34	48	3	17	20	17	51	68
Kota Sungai Penuh	5	–	5	2	2	4	7	2	9
Provinsi Jambi	163	91	254	31	236	267	194	327	521



Tabel 9.4 **Banyaknya SMK Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025**
Table 9.4 **Number of Public and Private Vocational Schools by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	7	1	8
Merangin	16	6	22
Sarolangun	14	10	24
Batang Hari	10	2	12
Muaro Jambi	11	9	20
Tanjung Jabung Timur	6	1	7
Tanjung Jabung Barat	10	2	12
Tebo	10	15	25
Bungo	13	6	19
Kota Jambi	6	27	33
Kota Sungai Penuh	5	–	5
Provinsi Jambi	108	79	187



Tabel 9.5 Banyaknya Akademi/Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025
Number of Public and Private Academy/University by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	–	1	1
Merangin	–	4	4
Sarolangun	–	3	3
Batang Hari	–	2	2
Muaro Jambi	2	1	3
Tanjung Jabung Timur	–	1	1
Tanjung Jabung Barat	–	2	2
Tebo	–	2	2
Bungo	–	7	7
Kota Jambi	2	19	21
Kota Sungai Penuh	1	6	7
Provinsi Jambi	5	48	53

Infrastruktur kesehatan

Health Infrastructure



44

BANYAKNYA RUMAH SAKIT
NUMBER OF HOSPITALS

24

BANYAKNYA KLINIK UTAMA
NUMBER OF PRINCIPAL CLINIC

179

BANYAKNYA KLINIK PRATAMA
NUMBER OF PRIMARY CLINIC

820

BANYAKNYA PUSKESMAS
NUMBER OF PUBLIC HEALTH CENTERS





Penjelasan Teknis Infrastruktur Kesehatan

1. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; dan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang.
2. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
3. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik secara komprehensif.
4. Balai Kesehatan merupakan jenis fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat atau pelayanan penunjang kesehatan.

Technical Notes Health Infrastructure

1. According to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2024 concerning the Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health, health care facilities include primary care facilities, advanced care facilities, and supporting care facilities.
2. A Hospital is an advanced healthcare facility that provides comprehensive individual health services through promotive, preventive, curative, rehabilitative, and/or palliative healthcare services, including inpatient, outpatient, and emergency care (Law No. 17 of 2023 concerning Health).
3. A Clinic is a health care facility that provides comprehensive basic and/or specialist medical services.
4. A Health Center is a type of advanced referral health care facility that provides public health services or health support services. In addition to providing public health services, centers can also provide individual health services. A Health



Selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, balai dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan. Balai Kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/34/2018 tentang Balai sebagai Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan).

5. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

6. Puskesmas dengan Rawat Inap adalah puskesmas yang diberi tambahan sumber daya kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal termasuk Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED), dan pelayanan rawat inap lainnya. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat).

7. Puskesmas tanpa Rawat Inap adalah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan

Center can be operated by the Central Government, Regional Governments, or the community (Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. HK.01.07/MENKES/34/2018 concerning Centers as a Type of Health Service Facility).

5. *A Community Health Center (Puskesmas) is a primary-level healthcare facility that organizes and coordinates promotive, preventive, curative, rehabilitative, and/or palliative health services, prioritizing promotive and preventive services in its working area (Law No. 17 of 2023 concerning Health).*

6. *A Community Health Center (Puskesmas) with Inpatient Care is a Community Health Center (Puskesmas) that has been given additional health resources to provide inpatient care for normal delivery services, including basic emergency obstetric and neonatal care, and other inpatient services. (Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 19 of 2024 concerning Community Health Centers).*

7. *A Community Health Center (Puskesmas) without Inpatient Care are community health centers that provide outpatient*



- di rumah, pelayanan persalinan normal, dan pelayanan gawat darurat. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat).
8. Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan salah satu bentuk unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang mengkoordinasikan urusan kesehatan di desa/kelurahan, termasuk pemberian Pelayanan kesehatan primer dan peningkatan partisipasi masyarakat pada tingkat desa/kelurahan. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan.
9. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan).
10. Praktik Mandiri Dokter adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek.
11. Praktik Mandiri Bidan adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan
- services, home care, normal delivery services, and emergency services. (Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 19 of 2024 concerning the Implementation of Community Health Centers).*
8. *A Auxiliary Health Center (Pustu) is a health service unit at the village/sub-district level that coordinates health affairs in the village/sub-district, including the provision of primary health care and increasing community participation at the village/sub-district level. The Pustu provides outpatient services and is accountable to the main community health center in the sub-district.*
9. *A Primary Clinic is a clinic that provides basic medical services. (Minister of Health Regulation Number 14 of 2021 concerning Standards for Business Activities and Products in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Health Sector).*
10. *An Independent Physician Practice is a healthcare facility/building used as a physician's practice that typically provides outpatient services, including physician practices that have inpatient facilities and a pharmacy.*
11. *An Independent Midwife Practice is a health facility/building used as a*



untuk tempat praktik bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.

midwife's practice location which usually provides services to pregnant women and babies.

12. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) adalah sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan. Poskesdes merupakan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan di lingkungannya dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Poskesdes dikelola oleh bidan dan dibantu beberapa kader.

12. Village Health Posts (Poskesdes) are health facilities/buildings established in villages/sub-districts to bring basic health services closer to the community. Poskesdes are a Community-Based Health Initiative (UKBM) that allows communities to play an active role in improving the health of their communities by providing early warning of various health risks and problems. Poskesdes are managed by midwives and assisted by several cadres.

13. Polindes (Pondok Bersalin Desa) adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompetensi teknis bidan tersebut.

13. Polindes (Village Maternity Post) is a building constructed with government funding and community participation to provide delivery assistance and accommodation for women in labor, as well as housing for village midwives. In addition to providing delivery assistance, it also provides maternal and child health (KIA) services, family planning (KB), and other health services according to community needs and the midwives' technical competence.

14. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Apotek).

14. A Pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmacists practice pharmacy (Minister of Health Regulation Number 26 of 2018 concerning Pharmacies).



Tabel 10.1 Banyaknya Rumah Sakit, Klinik Utama, dan Balai Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025
Number of Hospitals, Principal Clinics, and Health Centers by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Rumah Sakit <i>Hospital</i>	Klinik Utama <i>Principal Clinic</i>	Balai Kesehatan <i>Health Center</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	1	1	–
Merangin	4	3	–
Sarolangun	2	–	–
Batang Hari	2	2	–
Muaro Jambi	3	–	–
Tanjung Jabung Timur	2	–	–
Tanjung Jabung Barat	2	1	–
Tebo	2	–	–
Bungo	6	3	–
Kota Jambi	17	12	–
Kota Sungai Penuh	3	2	–
Provinsi Jambi	44	24	–



Tabel 10.2 **Banyaknya Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025**
Table 10.2 **Number of Public Health Center by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Puskesmas dengan Rawat Inap Community Health Center with Inpatient Care	Puskesmas tanpa Rawat Inap Community Health Center without Inpatient Care	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	5	16	21
Merangin	16	13	29
Sarolangun	15	1	16
Batang Hari	9	9	18
Muaro Jambi	8	15	23
Tanjung Jabung Timur	10	7	17
Tanjung Jabung Barat	10	7	17
Tebo	11	9	20
Bungo	8	11	19
Kota Jambi	4	16	20
Kota Sungai Penuh	5	6	11
Provinsi Jambi	101	110	211

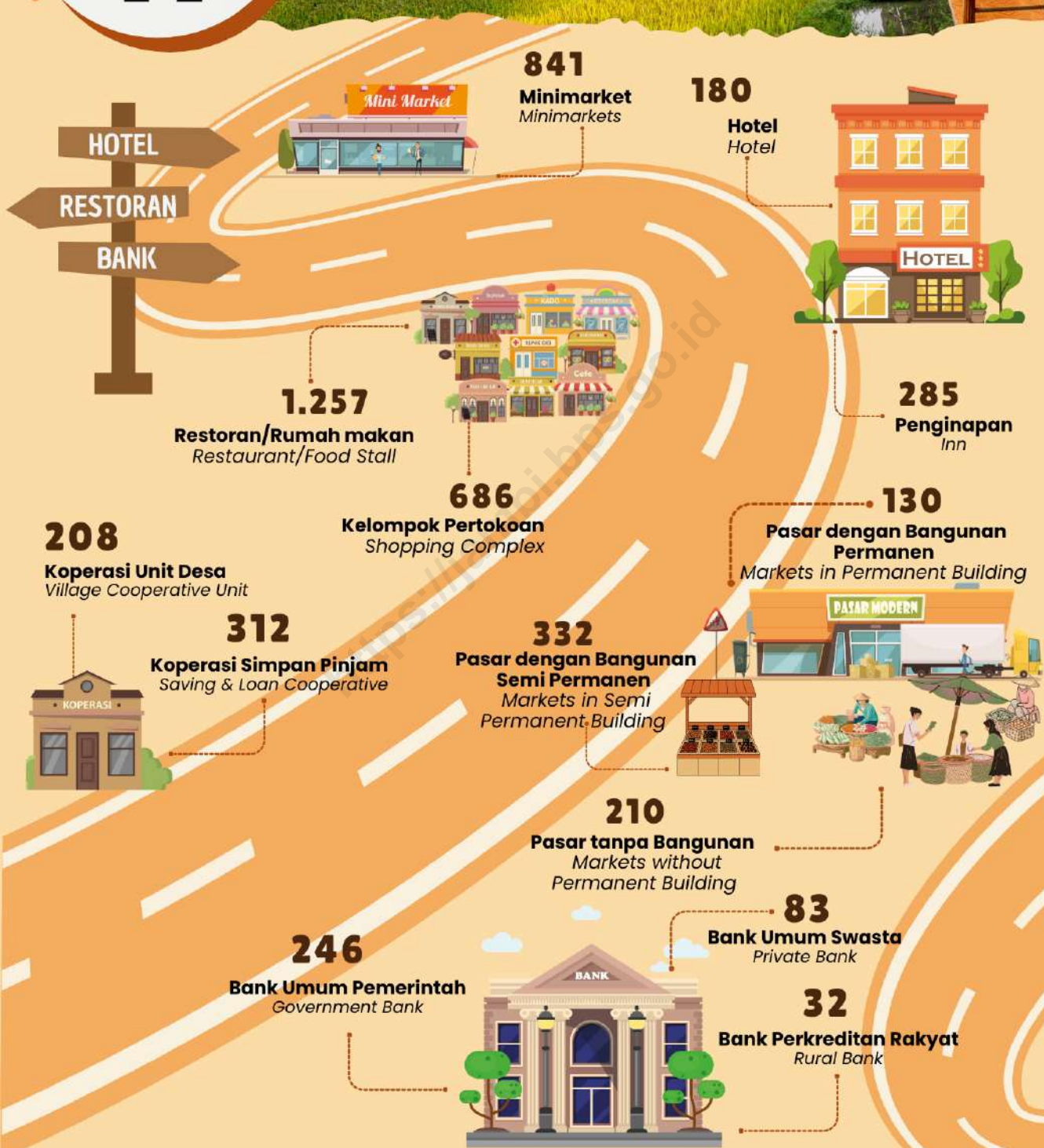


Tabel 10.3 Banyaknya Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter, Tempat Praktik Bidan, dan Apotek Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025
Number of Primary Clinics, Independent Physician Practices, Independent Midwife Practices, and Pharmacies by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Klinik Pratama Primary Clinic	Tempat Praktik Dokter Independent Physician Practice	Tempat Praktik Bidan Independent Midwife Practice	Apotek Pharmacy
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	1	71	220	51
Merangin	22	106	166	85
Sarolangun	11	68	186	58
Batang Hari	6	47	119	35
Muaro Jambi	6	68	212	82
Tanjung Jabung Timur	4	29	132	28
Tanjung Jabung Barat	22	56	133	61
Tebo	12	82	234	85
Bungo	18	81	207	83
Kota Jambi	69	229	144	221
Kota Sungai Penuh	8	71	56	38
Provinsi Jambi	179	908	1.809	827

INFRASTRUKTUR EKONOMI

Economic Infrastructure





Penjelasan Teknis Infrastruktur Ekonomi

1. Minimarket/swalayan adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400 m².
2. Supermarket, atau dengan sebutan lain adalah tempat perdagangan dengan sistem pelayanan mandiri, semua barang memiliki label harga, dan luas minimal 400 m².
3. Restoran adalah usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan dan mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak.
4. Rumah makan adalah jenis usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya dapat dilakukan diluar rumah makan, yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak.
5. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dll)

Technical Notes Economic Infrastructure

1. *Minimarket or convenience store is a self-service system that sells various types of goods at retail prices, with all goods labeled with prices, and a building area of less than 400 m².*
2. *Supermarket, or other similar establishments, is a place of commerce with a self-service system, where all goods are labeled with prices, and has a minimum area of 400 m².*
3. *Restaurant is a service business that serves food and beverages for consumption on the premises, located in part or all of a permanent building, equipped with services including cooking and serving according to orders, and characterized by the fact that buyers are usually subject to tax.*
4. *Food stall is a type of business that provides food services where food processing can be done outside the food stall, characterized by the fact that buyers are usually subject to tax.*
5. *Hotel is a type of accommodation that uses part or all of a building to provide lodging services, food and beverage services, and other services (such as restaurants, laundry, etc.) to the general public, managed commercially with a*



bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.

6. Penginapan (hostel/motel/losmen/wisma) adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
9. Fasilitas Perkreditan adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan

business license as a hotel.

6. *Lodging (hostel/motel/guesthouse/inn) is a type of accommodation that uses part or all of a building for lodging services for the general public, usually without food and beverage services, managed commercially with a business license other than a hotel.*
7. *Cooperative is a business entity consisting of individuals or legal entities based on cooperative principles and serving as a people's economic movement based on the principle of kinship.*
8. *Cooperatives implement the following cooperative principles:*
 - a. membership is voluntary and open;*
 - b. management is conducted democratically;*
 - c. distribution of surplus is done fairly in proportion to each member's contribution;*
 - d. limited return on capital;*
 - e. Independence.*
9. *Credit facilities are financial facilities that enable individuals or business*



seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Tidak termasuk pinjaman dari perorangan.

entities to borrow money to purchase products and repay it within a specified period. This does not include loans from individuals.

<https://jambi.bps.go.id>

**Tabel**
Table**11.1****Banyaknya Kelompok Pertokoan dan Pasar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025**
Number of Shopping Complexs and Markets by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kelompok Pertokoan Shopping Complexs	Pasar dengan Bangunan Permanen Markets in Permanent Building	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen Markets in Semi Permanent Building	Pasar tanpa Bangunan Markets without Building
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	22	7	17	58
Merangin	60	6	72	17
Sarolangun	43	9	24	36
Batang Hari	15	22	24	14
Muaro Jambi	37	7	32	10
Tanjung Jabung Timur	5	10	12	15
Tanjung Jabung Barat	15	18	46	34
Tebo	61	23	46	11
Bungo	60	11	43	5
Kota Jambi	345	15	12	2
Kota Sungai Penuh	23	2	4	8
Provinsi Jambi	686	130	332	210



Tabel 11.2 Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025
Table 11.2 Number of Trading Facilities by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Minimarket/Swalayan/Supermarket Minimarket/Swalayan/Supermarket	Restoran/Rumah Makan Restaurant/Food Stall
(1)	(2)	(3)
Kerinci	50	212
Merangin	65	70
Sarolangun	65	98
Batang Hari	54	67
Muaro Jambi	120	37
Tanjung Jabung Timur	19	24
Tanjung Jabung Barat	44	97
Tebo	82	100
Bungo	54	22
Kota Jambi	249	442
Kota Sungai Penuh	39	88
Provinsi Jambi	841	1.257



Tabel 11.3 **Banyaknya Sarana Akomodasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025**
Table 11.3 **Number of Acomodation Facilities by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Hotel Hotel	Penginapan Inn
(1)	(2)	(3)
Kerinci	5	96
Merangin	13	29
Sarolangun	9	8
Batang Hari	–	9
Muaro Jambi	1	10
Tanjung Jabung Timur	3	12
Tanjung Jabung Barat	13	36
Tebo	10	8
Bungo	27	17
Kota Jambi	86	38
Kota Sungai Penuh	13	22
Provinsi Jambi	180	285



Tabel 11.4 Banyaknya Lembaga Keuangan Bank Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025
Table 11.4 Number of Bank Facilities by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Bank Umum Pemerintah Government Bank	Bank Umum Swasta Private Bank	Bank Perkreditan Rakyat Rural Bank
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	15	–	2
Merangin	25	4	1
Sarolangun	21	2	3
Batang Hari	21	2	–
Muaro Jambi	25	–	4
Tanjung Jabung Timur	12	–	–
Tanjung Jabung Barat	21	6	1
Tebo	25	2	–
Bungo	20	10	1
Kota Jambi	53	54	18
Kota Sungai Penuh	8	3	2
Provinsi Jambi	246	83	32



Tabel 11.5 Banyaknya Lembaga Keuangan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2025
Table 11.5 Number of Cooperative by Regency/Municipality in Jambi Province, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kooperasi Unit Desa Village Cooperative Unit	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat Small Industry and Citizen Handicraft Cooperative	Koperasi Simpan Pinjam Saving and Loan Cooperative	Koperasi Lainnya Other Cooperative
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	6	9	33	13
Merangin	24	3	27	7
Sarolangun	19	1	20	13
Batang Hari	28	6	19	6
Muaro Jambi	44	11	24	29
Tanjung Jabung Timur	3	–	33	15
Tanjung Jabung Barat	33	1	27	13
Tebo	24	1	26	19
Bungo	27	1	46	3
Kota Jambi	–	1	45	126
Kota Sungai Penuh	–	1	12	7
Provinsi Jambi	208	35	312	251

Catatan: ¹ Data provinsi tidak mencakup sebagian desa/kelurahan yang tidak berhasil dicacah karena kendala keamanan dan lainnya. Secara nasional, terdapat 152 desa/kelurahan yang tidak berhasil dicacah.

Note: ¹ Provincial data does not include some villages/subdistricts that were not successfully enumerated due to security and other constraints. Nationally, there are 152 villages/subdistricts that have not successfully enumerated.



Daftar Pustaka

Bibliography

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 2025. *Buku 1: Pedoman Kepala BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 2025. *Buku 3: Pedoman Konsep dan Definisi Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

<https://jambi.bps.go.id>



LAMPIRAN

APPENDIX





Lampiran **Realisasi Cakupan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) Menurut**
Appendix **1 Kabupaten/Kota¹ di Provinsi Jambi**
Realisation of the Coverage of Village Development Data Update 2025 (Village Potential
2025) by Regency/Municipality¹ in Jambi Province

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Total			Persentase (%) Percentage (%)		
	Berhasil Dicacah Successfully Enumerated	Tidak Berhasil Dicacah Not Successfully Enumerated	Jumlah Total	Berhasil Dicacah Successfully Enumerated	Tidak Berhasil Dicacah Not Successfully Enumerated	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	287	–	287	100,00	–	100,00
Merangin	215	–	215	100,00	–	100,00
Sarolangun	159	–	159	100,00	–	100,00
Batang Hari	124	–	124	100,00	–	100,00
Muaro Jambi	155	–	155	100,00	–	100,00
Tanjung Jabung Timur	93	–	93	100,00	–	100,00
Tanjung Jabung Barat	134	–	134	100,00	–	100,00
Tebo	129	–	129	100,00	–	100,00
Bungo	153	–	153	100,00	–	100,00
Kota Jambi	68	–	68	100,00	–	100,00
Kota Sungai Penuh	69	–	69	100,00	–	100,00
Provinsi Jambi	1.586	–	1.586	100,00	–	100,00

Catatan: ¹ Cakupan yang dihitung adalah desa/kelurahan yang berstatus operasional

Note: ¹ The coverage calculated is villages/sub-districts with operational status.

**Lampiran
Appendix**

2

**Kuesioner Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025)
Questionnaire of Village Development Data Update 2025 (Village Potential 2025)****REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
PEMUTAKHIRAN DATA PERKEMBANGAN DESA 2025****RAHASIA****PODES2025-DESA**

I. KETERANGAN TEMPAT				
101	Provinsi			
102	Kabupaten/Kota *)			
103	Kecamatan			
104	Desa/Kelurahan *)			
105	Status Daerah	Perkotaan - 1	Perdesaan - 2	
106	SK pembentukan/pengesahan desa/kelurahan: Permendagri/Kepmendagri -1 Perda Provinsi -2 Perda Kabupaten -3	SK Gubernur/Bupati Lainnya -4 -5		
107	Status definitif desa dan operasional desa/kelurahan: a. Ada wilayah desa/kelurahan dengan batas yang jelas Ya - 1 Tidak - 2 b. Ada penduduk yang menetap di wilayah desa/kelurahan Ya - 1 Tidak - 2 c. Ada pemerintah desa/kelurahan Ya - 1 Tidak - 2			
Jika R107 a, b atau c ada yang berkode 2 maka lanjutkan ke R201 sampai R207 kemudian STOP				
108	Lokasi pelayanan pemerintah desa/kelurahan:			
	a. Alamat lengkap			
	b. Nomor telepon			
	c. Alamat e-Mail			
	d. Kode Pos			
II. KETERANGAN PETUGAS DAN NARASUMBER				
201	Nama Pencacah		202	NIP/NIM
203	Tanggal Kunjungan			
	No			
204	Nama Pengawas/ Pemeriksa		205	NIP/NIM
206	Tanggal Pemeriksaan			
207	Narasumber :			
	Nama	Jabatan	No. Telepon	Email
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

*) Coret yang tidak sesuai

**DAFTAR INI DIISI OLEH PETUGAS BERDASARKAN HASIL PENCACAHAN/
WAWANCARA DENGAN NARASUMBER TERKAIT YANG BERWENANG
DAN RELEVAN, SERTA PENELUSURAN DOKUMEN DESA/KELURAHAN**..... 2025
Mengetahui
Kepala Desa/Lurah*)

Nama dan Stempel



Lanjutan Lampiran
Continued Appendix 2

III. KETERANGAN UMUM DESA/KELURAHAN				
301	Status pemerintahan: <i>Desa - 1 Kelurahan - 2 UPT/SPT - 3 Nagari - 4</i>			☐
302	a. Ada wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut: <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i> b. Jika berbatasan dengan laut, pemanfaatan laut: 1) Perikanan tangkap (mencakup seluruh biota laut) <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i> 2) Perikanan budidaya (mencakup seluruh biota laut) <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i> 3) Tambak garam <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i> 4) Wisata bahari <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i> 5) Transportasi umum <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i>			☐ ☐ ☐ ☐ ☐
303	a. Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap kawasan hutan/hutan: <i>Di dalam kawasan hutan - 1 Di tepi/sekitar kawasan hutan - 2 Di luar kawasan hutan - 3 → R401</i> b. Fungsi kawasan hutan/hutan: Pilihan boleh lebih dari satu kode. <i>Konservasi - A Lindung - B Produksi - C</i>			☐
304	a. Jumlah Rukun Warga (RW) di desa/kelurahan b. Jumlah Rukun Tetangga (RT) di desa/kelurahan			
IV. KEPENDUDUKAN				
401	Penduduk dan keluarga pada 1 Januari 2025 :			
	a. Jumlah penduduk laki-laki		orang	
	b. Jumlah penduduk perempuan		orang	
	c. Jumlah keluarga		keluarga	
	d. Jumlah keluarga pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan)		keluarga	
V. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
501	a. Jumlah keluarga pengguna listrik : 1. PLN (Perusahaan Listrik Negara) keluarga 2. Non-PLN (misalnya: swasta, swadaya, atau perseorangan) keluarga b. Jumlah keluarga bukan pengguna listrik keluarga			
502	a. Penerangan di jalan utama desa/kelurahan: <i>Ada, sebagian besar - 1 Ada, sebagian kecil - 2 Tidak ada - 3 → R503</i> b. Sumber penerangan di jalan utama desa/kelurahan: <i>Listrik diusahakan oleh pemerintah - 1 Listrik diusahakan oleh non pemerintah - 2 Non listrik - 3</i>			☐ ☐
503	Bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga : <i>Listrik - 1 Gas kota - 5 Arang - 9</i> <i>Elpiji 5,5 kg - 2 Biogas - 6 Kayu bakar - 10</i> <i>Elpiji 12 kg - 3 Minyak tanah - 7 Lainnya - 11</i> <i>Elpiji 3 kg - 4 Briket - 8</i>			
504	Pencemaran lingkungan hidup (polusi) di desa/kelurahan selama setahun terakhir :			
	Pencemaran lingkungan hidup (polusi)	Kejadian pencemaran lingkungan Hidup <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i>	Jika ada kejadian pencemaran lingkungan hidup (kolom (2) berkode 1)	
			Sumber pencemaran lingkungan hidup yang utama <i>Rumah tangga - 1 Pabrik/industri/usaha - 2 Lainnya - 3</i>	Pengaduan warga ke aparat desa/kelurahan <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Air	☐	☐	☐
	b. Tanah	☐	☐	☐
	c. Udara	☐	☐	☐



Lanjutan Lampiran **2**
Continued Appendix

505	Kegiatan pelestarian lingkungan dan mitigasi adaptasi terhadap perubahan iklim selama setahun terakhir							
	Jenis Kegiatan	Ada, warga terlibat Ada, warga tidak terlibat Tidak ada kegiatan						- 1 - 2 - 3
	(1)	(2)						
	a. Penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove, dan reboisasi di desa/kelurahan	☐						
	b. Pengolahan/daur ulang sampah/limbah di desa/kelurahan	☐						
	c. Penggunaan pupuk organik di lahan pertanian di desa/kelurahan	☐						
	d. Pembuatan lubang biopori di desa/kelurahan	☐						
	e. Pemanfaatan energi baru terbarukan (tenaga surya/angin/mikrohidro/biogas/biomassa/pasang surut/arus laut) di desa/kelurahan	☐						
	f. Penerapan pola tanam (rotasi tanaman, tumpang sari dll) di desa/kelurahan	☐						
	g. Penampungan/pemanenan air hujan di desa/kelurahan	☐						
	h. Pembuatan atau pemeliharaan terasering di desa/kelurahan	☐						
VI. BENCANA ALAM DAN MITIGASI BENCANA ALAM								
601	Kejadian/bencana alam (mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat) yang terjadi :							
	Kejadian/bencana alam	Kejadian Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika ada kejadian/bencana alam (kolom (2) berkode 1)					
			Tahun 2024			Januari - Mei 2025		
			Banyak kejadian	Korban Meninggal	Keberadaan Korban	Banyak kejadian	Korban Meninggal	Keberadaan Korban
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Tanah longsor	☐	☐		A B C D	☐		A B C D
	b. Banjir	☐	☐		A B C D	☐		A B C D
	c. Banjir bandang	☐	☐		A B C D	☐		A B C D
	d. Gempa bumi	☐	☐		A B C D	☐		A B C D
	e. Tsunami	☐	☐		A B C D	☐		A B C D
	f. Gelombang pasang laut	☐	☐		A B C D	☐		A B C D
	g. Angin puyuh/puting beliung/ topan	☐	☐		A B C D	☐		A B C D
	h. Letusan gunung api	☐	☐		A B C D	☐		A B C D
	i. Kebakaran hutan dan lahan	☐	☐		A B C D	☐		A B C D
	j. Kekeringan	☐	☐		A B C D	☐		A B C D
	k. Abrasi	☐	☐		A B C D	☐		A B C D
	Kode kolom (5) dan (8): Pilihan boleh lebih dari satu kode							
	Korban hilang - A			Korban terluka/sakit - B				
	Korban mengungsi - C			Tidak ada korban hilang/terluka/sakit/mengungsi - D				
602	Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di desa/kelurahan:							
	a. Sistem peringatan dini bencana alam	Ada - 1 Tidak ada - 2						☐
	b. Sistem peringatan dini khusus tsunami	Ada - 1	Tidak ada - 2	Bukan wilayah potensi tsunami - 3				☐
	c. Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll.)	Ada - 1 Tidak ada - 2						☐
	d. Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana	Ada - 1 Tidak ada - 2						☐
	e. Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll.	Ada - 1 Tidak ada - 2						☐



Lanjutan Lampiran 2

Continued Appendix

603	Kejadian berikut terjadi di desa/kelurahan dalam 5 tahun terakhir:				
	a. Penggundulan hutan, hutan menjadi permukiman, kebun, tambang, dll				
	Ya - 1 Tidak - 2	☐			
	b. Peningkatan Penggunaan pupuk kimia & pestisida				
	Ya - 1 Tidak - 2	☐			
	c. Peningkatan perilaku kebiasaan membakar sampah dan membuang sampah di tempat ilegal				
	Ya - 1 Tidak - 2	☐			
	d. Peningkatan jumlah pabrik dan industri				
	Ya - 1 Tidak - 2	☐			
	e. Peningkatan jumlah warga yang memiliki kendaraan bermotor roda 4 atau lebih				
	Ya - 1 Tidak - 2	☐			
604	Kejadian berikut dirasakan oleh penduduk desa/kelurahan selama 5 tahun terakhir:				
	a. Kelangkaan air karena kemarau panjang				
	Ya, ada sebagian besar - 1 Ya, ada sebagian kecil - 2 Tidak merasakan - 3	☐			
	b. Penduduk desa semakin sulit bertani (serangan hama, kemarau Panjang, menangkap ikan di laut (cuaca ekstrem), dst)				
	Ya, ada sebagian besar - 1 Ya, ada sebagian kecil - 2 Tidak merasakan - 3	☐			
	c. Penduduk desa kehilangan mata pencaharian yang bergantung pada alam (banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, dll)				
	Ya, ada sebagian besar - 1 Ya, ada sebagian kecil - 2 Tidak merasakan - 3	☐			
	d. Gangguan kesehatan (Pneumonia, Malaria, dan DBD)				
	Ya, ada sebagian besar - 1 Ya, ada sebagian kecil - 2 Tidak merasakan - 3	☐			
	e. Kerusakan rumah dan harta benda karena bencana terkait iklim (banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, karhutla, gel. pasang)				
	Ya, ada sebagian besar - 1 Ya, ada sebagian kecil - 2 Tidak merasakan - 3	☐			
	f. Gagal panen, kerusakan tanaman atau kematian ternak karena bencana terkait iklim				
	Ya, ada sebagian besar - 1 Ya, ada sebagian kecil - 2 Tidak merasakan - 3	☐			
VII. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN					
701	Keberadaan fasilitas pendidikan menurut jenjang pendidikan di desa/kelurahan				
	Jumlah	Jika tidak ada fasilitas pendidikan (<i>kolom (2) dan kolom (3) terisi 0</i>), untuk mencapai fasilitas pendidikan terdekat			
	Jenis fasilitas pendidikan	Jarak (km)			
	Negeri Swasta	Kemudahan untuk mencapai:			
		Sangat mudah -1			
		Mudah -2			
		Sulit -3			
		Sangat sulit -4			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. TK				☐
	b. RA/BA				☐
	c. SD				☐
	d. MI				☐
	e. SMP				☐
	f. MTs				☐
	g. SMA				☐
	h. MA				☐
	i. SMK				☐
	j. Akademi/Perguruan Tinggi				☐



Lanjutan Lampiran 2
Continued Appendix

702	Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di desa/kelurahan						
	Jenis fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah	<i>Jika tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan (kolom (2) terisi 0), untuk mencapai fasilitas pelayanan kesehatan terdekat</i>				
			Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai: Sangat mudah -1 Sulit -3 Mudah -2 Sangat sulit -4			
	(1)	(2)	(3)	(4)			
	a. Rumah sakit		,				
	b. Klinik utama		,				
	c. Balai kesehatan		,				
	d. Puskesmas dengan rawat inap		,				
	e. Puskesmas tanpa rawat inap		,				
	f. Puskesmas pembantu		,				
	g. Klinik pratama		,				
	h. Praktik mandiri dokter		,				
	i. Praktik mandiri bidan		,				
	j. Poskesdes (pos kesehatan desa)		,				
	k. Polindes (pondok bersalin desa)		,				
	l. Apotek		,				
	m. Toko khusus obat/jamu		,				
703	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) selama setahun terakhir : a. Jumlah posyandu aktif: unit b. Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap sebulan sekali: unit c. Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih: unit d. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu): unit						
VIII. ANGKUTAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI							
801	Prasarana dan sarana transportasi antar desa/kelurahan : a. Lalu lintas dari/ke desa/kelurahan melalui : Darat - 1 Air - 2 → R801c Darat dan air - 3 Udara - 4 → R801c						
	b. Jika lalu lintas dari/ke desa/kelurahan melalui darat atau darat dan air (R801a berkode 1 atau 3): 1. Jenis permukaan jalan darat antar desa/kelurahan yang terluas : Aspal/beton - 1 Tanah - 3 Diperkeras (kerikil, batu, dll.) - 2 Lainnya (jalan setapak, kayu/papan, dll) - 4						
	2. Jalan darat antar desa/kelurahan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih : Sepanjang tahun - 1 Sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll.) - 2 Selama musim kemarau - 3 Tidak dapat dilalui sepanjang tahun - 4						
	c. Angkutan umum yang melewati desa/kelurahan : 1. Keberadaan angkutan umum: Pilihan boleh lebih dari satu kode. Ada, dengan trayek tetap - A Ada, tanpa trayek tetap - B Tidak ada angkutan umum - X → R802 <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>A</td><td>B</td><td>X</td></tr></table>				A	B	X
A	B	X					
	2. Operasional angkutan umum yang utama : Setiap hari - 1 Tidak setiap hari - 2						
	3. Jam operasi angkutan umum yang utama : Siang dan malam hari - 1 Hanya siang/malam hari - 2						
	4. Ketersediaan angkutan online (memesan angkutan online): Ada - 1 Tidak ada - 2						



Lanjutan Lampiran 2

Continued Appendix

802	Sarana transportasi dari kantor kepala desa/lurah ke kantor camat/bupati/walikota:						
	Sarana transportasi yang biasa digunakan oleh sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa/lurah ke	Sarana transportasi yang biasa digunakan	Jika ada angkutan umum (<i>kolom (2) A dilingkari</i>)		Jarak tempuh (km)	Waktu tempuh (jam: menit)	Biaya transportasi (Ribu Rupiah)
			Jenis angkutan umum	Angkutan umum yang utama			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a. Kantor camat	A B C	A B C D E	☐		:		
b. Kantor bupati/walikota	A B C	A B C D E	☐		:		
Kode kolom (2): pilihan boleh lebih dari satu kode: <i>Angkutan umum</i> - A <i>Kendaraan pribadi jalan kaki, sepeda, dll.</i> - B - C Kode kolom (3): pilihan boleh lebih dari satu kode: <i>Ojek sepeda motor</i> - A <i>Kendaraan bermotor roda 3 atau lebih</i> - B <i>Perahu (bermotor maupun tidak bermotor)</i> - C <i>Pesawat terbang</i> - D <i>Lainnya (becak, delman, pedati, dll)</i> - E Kode kolom (4): <i>Ojek sepeda motor</i> - A <i>Kendaraan bermotor roda 3 atau lebih</i> - B <i>Perahu (bermotor maupun tidak bermotor)</i> - C <i>Pesawat terbang</i> - D <i>Lainnya (becak, delman, pedati, dll)</i> - E							
803	a. Jumlah keluarga yang berlangganan telepon kabel: keluarga b. Keberadaan warga yang menggunakan telepon seluler/handphone: <i>Sebagian besar warga</i> - 1 ☐ <i>Sebagian kecil warga</i> - 2 ☐ <i>Tidak ada</i> - 3 ☐						
804	Keberadaan menara telepon seluler, sinyal telepon dan sinyal internet di desa/kelurahan a. Jumlah menara telepon seluler atau <i>Base Transceiver Station (BTS)</i> : b. Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone yang menjangkau di desa/kelurahan: jenis c. Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa/kelurahan: <i>Sinyal sangat kuat</i> - 1 <i>Sinyal kuat</i> - 2 <i>Sinyal lemah</i> - 3 <i>Tidak ada sinyal</i> - 4 → R805 ☐ d. Sinyal internet telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan: <i>5G/4G/LTE</i> - 1 <i>3G/H/H+/EVDO</i> - 2 <i>2,5G/E/GPRS</i> - 3 <i>Tidak ada sinyal internet</i> - 4 ☐						
805	a. Kantor pos/pos pembantu/rumah pos: <i>Beroperasi</i> - 1 <i>Jarang beroperasi</i> - 2 <i>Tidak beroperasi</i> - 3 <i>Tidak ada</i> - 4 ☐ b. Layanan pos keliling: <i>Ada</i> - 1 <i>Tidak ada</i> - 2 ☐ c. Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/dokumen) swasta: <i>Beroperasi</i> - 1 <i>Jarang beroperasi</i> - 2 <i>Tidak beroperasi</i> - 3 <i>Tidak ada</i> - 4 ☐						
IX. EKONOMI							
901	a. Keberadaan pangkalan/agen/penjual minyak tanah (termasuk penjual minyak tanah keliling): <i>Ada</i> - 1 <i>Tidak ada</i> - 2 ☐ b. Keberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling): <i>Ada</i> - 1 <i>Tidak ada</i> - 2 ☐						
902	a. Jumlah bank yang beroperasi di desa/kelurahan 1. Bank Umum Pemerintah (BRI, BNI, Mandiri, BPD, BTN) 2. Bank Umum Swasta (BCA, Permata, Sinarmas, CIMB, dll) 3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) b. Jika tidak ada bank, perkiraan jarak ke bank terdekat:, ... km						
903	Jumlah koperasi di desa/kelurahan yang masih aktif: a. Koperasi Unit Desa (KUD): b. Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)/Usaha mikro c. Koperasi Simpan Pinjam (KSP/Kospin) d. Koperasi lainnya						
904	Fasilitas kredit yang diterima warga desa/kelurahan selama setahun terakhir: a. Kredit Usaha Rakyat (KUR) <i>Ada</i> - 1 <i>Tidak ada</i> - 2 ☐ b. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPP-E) <i>Ada</i> - 1 <i>Tidak ada</i> - 2 ☐ c. Kredit Usaha Kecil (KUK) <i>Ada</i> - 1 <i>Tidak ada</i> - 2 ☐ d. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) <i>Ada</i> - 1 <i>Tidak ada</i> - 2 ☐						



Lanjutan Lampiran 2
Continued Appendix

905	Jumlah fasilitas ekonomi di desa/kelurahan			
	Jenis fasilitas ekonomi	Jumlah	Jika tidak ada fasilitas ekonomi (kolom (2) terisi 0), untuk mencapai fasilitas ekonomi terdekat Kemudahan untuk mencapai: Sangat mudah -1 Mudah -2 Sulit -3 Sangat sulit -4	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Kelompok pertokoan (minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi)			
	b. Pasar dengan bangunan permanen (memiliki atap, lantai, dan dinding)			
	c. Pasar dengan bangunan semi permanen (memiliki atap dan lantai, tanpa dinding)			
	d. Pasar tanpa bangunan (misalnya: pasar subuh, pasar terapung, dll.)			
	e. Jumlah minimarket/swalayan/supermarket (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan label harga, sistem pelayanan mandiri)			
	f. Restoran/rumah makan (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya dikenai pajak)			
	g. Warung/kedai makanan minuman (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya tidak dikenai pajak)			
	h. Hotel (menyediakan jasa akomodasi dan ada restoran, penginapan dengan izin usaha sebagai hotel)			
	i. Penginapan: hostel/motel/losmen/wisma (menyediakan akomodasi, penginapan dengan izin usaha bukan sebagai hotel)			
	j. Toko/warung kelontong (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang keperluan sehari-hari secara eceran, tanpa ada sistem pelayanan mandiri)			
906	a. Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan berasal dari lapangan usaha: Pertanian -1 Industri -2 → R907 Jasa -3 → R907			
	b. Jika sektor pertanian, Jenis sub sektor utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan: Tanaman Pangan -1 Peternakan -4 Jasa Pertanian -7 → R907 Tanaman Hortikultura -2 Perikanan -5 Tanaman Perkebunan -3 Kehutanan -6			
	c. Komoditas utama dari sub sektor utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan:.....			
907	a. Jumlah industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja)			
	b. Jumlah Sentra Industri: lokasi			
	c. Jika terdapat sentra industri, tuliskan produk pada sentra industri yang mempunyai muatan usaha terbanyak(tuliskan)			
908	a. Keberadaan produk barang unggulan/utama di desa/kelurahan: Ada -1 Tidak ada -2 → R1001			
	b. Produk barang unggulan/utama desa/kelurahan: 1. Makanan(tuliskan) 2. Non Makanan(tuliskan)			
X. KEAMANAN				
1001	a. Kejadian perkelahian massal di desa/kelurahan selama setahun terakhir : Ada -1 Tidak ada -2 → R1003			
	b. Jika ada kejadian perkelahian massal, jumlah perkelahian massal yang terjadi			
	c. Keberadaan korban:			
	1 Meninggal Ada -1 Tidak ada -2			
	2 Luka-luka Ada -1 Tidak ada -2			
	d. Penyebab perkelahian: Pilihan boleh lebih dari satu kode.			
	Harta -A Asmara -C Keramaian (olah raga, hiburan, dll.) -E Kekuasaan -B Ideologi/kepercayaan -D Ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan -F Lainnya -G			



Lanjutan Lampiran 2

Continued Appendix

1002	Upaya penyelesaian perkelahian massal dilakukan oleh: Pilihan boleh lebih dari satu kode. <i>Aparat keamanan - A Tokoh masyarakat - C Lainnya - E</i> <i>Aparat pemerintah - B Tokoh agama - D Tidak ada - X</i>				A B C D E X				
1003	Kegiatan warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan lingkungan di desa/kelurahan selama setahun terakhir :								
	a. Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan:	Ya - 1	Tidak - 2	☐					
	b. Pembentukan/pengaturan regu keamanan:	Ya - 1	Tidak - 2	☐					
	c. Penambahan jumlah anggota hansip/linmas:	Ya - 1	Tidak - 2	☐					
	d. Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan:	Ya - 1	Tidak - 2	☐					
	e. Pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga:	Ya - 1	Tidak - 2	☐					
XI. KEUANGAN DAN ASET DESA									
Blok ini akan terisi jika Blok III R 301, status pemerintahannya adalah Desa atau UPT/SPT atau Nagari									
1101	a. Keberadaan sistem informasi desa: <i>Ada, diperbaharui - 1</i> <i>Ada, tidak diperbaharui - 2</i> <i>Tidak ada - 3</i> ☐								
	b. Jika ada (R1101a=1 atau 2), kapan terakhir diperbaharui bulan..... dan tahun.....								
	c. Penggunaan sistem keuangan desa: <i>Ada, diperbaharui - 1</i> <i>Ada, tidak diperbaharui - 2</i> <i>Tidak ada - 3</i> ☐								
1102	Kepemilikan badan usaha dan aset desa:								
	a. Jumlah unit usaha BUMDes:								unit
	b. Tanah kas desa/ulayat	<i>Ada - 1</i>	<i>Tidak ada - 2</i>	☐					
	c. Tambatan perahu	<i>Ada - 1</i>	<i>Tidak ada - 2</i>	☐					
	d. Pasar (pasar desa, pasar hewan, pelelangan ikan yang dikelola desa, pelelangan hasil pertanian)	<i>Ada - 1</i>	<i>Tidak ada - 2</i>	☐					
	e. Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, lapangan olah raga, dll)	<i>Ada - 1</i>	<i>Tidak ada - 2</i>	☐					
	f. Hutan milik desa	<i>Ada - 1</i>	<i>Tidak ada - 2</i>	☐					
	g. Mata air milik desa	<i>Ada - 1</i>	<i>Tidak ada - 2</i>	☐					
	h. Tempat wisata/Pemandian umum	<i>Ada - 1</i>	<i>Tidak ada - 2</i>	☐					
	i. Aset desa lainnya (kekayaan asli desa lainnya, hibah/sumbangan/sejenisnya dll)	<i>Ada - 1</i>	<i>Tidak ada - 2</i>	☐					
1103	Jumlah peraturan desa tahun 2024: buah								
XII. KETERANGAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN									
1201	Keberadaan kepala desa/lurah dan sekretaris kepala desa/lurah:								
	Pemerintah desa/kelurahan	Keberadaan <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>	Jika ada pemerintah desa/kelurahan (kolom (2) berkode 1)						
			Umur (tahun)	Jenis kelamin <i>Laki-laki - 1</i> <i>Perempuan - 2</i>	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
	a. Kepala Desa/Lurah	☐		☐	☐				
	b. Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	☐		☐	☐				
	*) Kode kolom (5): <i>Tidak pernah sekolah - 1</i> <i>SMP/Sederajat - 4</i> <i>Diploma IV/S1 - 7</i> <i>Tidak tamat SD/Sederajat - 2</i> <i>SMU/Sederajat - 5</i> <i>S2 - 8</i> <i>Tamat SD/Sederajat - 3</i> <i>Akademi/DIII - 6</i> <i>S3 - 9</i>								
1202	Jumlah aparatur pemerintahan desa/kelurahan:								
	a. Sekretariat Desa/Kelurahan		c. Pelaksana Kewilayahan						
	b. Pelaksana Teknis		d. Pegawai Desa/Kelurahan lainnya						
1203	a. Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan: <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i> → STOP ☐								
	b. Jika ada (R1203a=1), apakah ada anggota yang perempuan:	<i>Ada - 1</i>	<i>Tidak ada - 2</i>	☐					
	c. Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan selama tahun 2024 :								
XIII. CATATAN									

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

ENLIGHTEN THE NATION

